

**PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
(STUDI KASUS DI DESA KELET, KEC. KELING, KAB. JEPARA)**

SKRIPSI

Program Strata (S-1) Ilmu Politik



disusun oleh :

AJI ALI SAPUTRA

1706016016

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2022**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Aji Ali Saputra

NIM : 1706016016

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Perempuan dan Pembangunan Desa Perspektif *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Dengan ini saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Desember 2022

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A.

Tanggal : 15 Desember 2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
(STUDI KASUS DI DESA KELET, KEC. KELING, KAB. JEPARA)**

Disusun Oleh :

Aji Ali Saputra

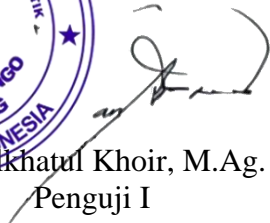
1706016016

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
Pada tanggal 28 Desember 2022 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



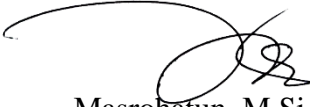
Ketua


Dr. Fokhatul Khoir, M.Ag.
Penguji I

Sekretaris


Muhammad Mahsun, MA.
Penguji II

Anggota


Masrohaturun, M.Si.
Penguji III

Pembimbing


Muhammad Mahsun, MA.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Desember 2022



Aji Ali Saputra

1706016016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil 'alamin wabihi nastain 'ala umuriddunnya wadin wassolatu wassalam 'ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wamaulana muhammadin amma ba'du.

Alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perempuan dan Pembangunan Desa Perspektif *Sustainable Development Goals (SDGs)* Studi Kasus di Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Politik

Penulis sebagai mahasiswa setelah 5 (Lima) tahun lamanya menempuh studi di jurusan ilmu politik masih banyak keterbatasan keilmuan yang dimiliki, sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini masih alakadarnya dan jauh dari kata sempurna. Harapan kecil penulis tentunya skripsi ini mampu membuka cara pandang baru dalam melihat realitas perempuan dalam partisipasi pembangunan desa dalam tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pada dimensi gender dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua *amin yarobbal alamin.*

Skripsi ini dibuat oleh penulis dengan semangat dan alhamdulillah mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materiil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, ikhsan dan kesehatan, keilmuan serta rizqi bagi penulis.

2. Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi panutan yang menginspirasi penulis.
3. Kedua orang tua, Ibu Khuriyatun dan Bapak Ali Anwar serta keluarga yang telah memberikan segala hal untuk penyelesaian studi ini.
4. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
6. Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo.
7. Solkhah Mufrikhah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing selama kuliah penulis, yang selalu mendukung dan mengingatkan untuk terus semangat dalam melaksanakan kuliah.
8. Muhammad Mahsun, M.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang telah memberikan banyak masukan dan transfer ilmu serta menginspirasi penulis untuk selalu membaca, menulis dan riset.
9. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu pengetahuan baru serta mampu menjadi teman berdiskusi penulis dalam membahas berbagai hal.
10. Seluruh staf tenaga pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang banyak membantu dalam proses keadministrasian selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Sahabat-sahabati, sedulur-sedulur, rekan-rekanita dan kolega PMII, KMJS, IPNU, HMJ Ilmu Politik, dan SEMA UIN Walisongo yang menjadi teman dalam berproses sehingga memunculkan kesadaran dan membuka pikiran penulis tentang pentingnya organisasi.
12. Teman-teman kelas Ilmu Politik B 2017, Teman-teman satu jurusan Ilmu Politik 2017 dan teman-teman satu angkatan FISIP 2017

13. Para senior yang memberikan penulis warna dalam dunia perkuliahan sehingga dapat mengarungi dunia perkuliahan dengan baik.
14. Para junior yang memberikan penulis warna baru dalam aktifitas sehingga penulis merasa muda dalam semangat meraih cita-cita.
15. Teman-teman kelas bahasa Brilliant English Course, PPL, KKL dan KKN Posko 6 MIT DR Desa Plajan yang membersamai penulis dalam pengabdian hingga selesai pengabdian. Tak lupa bu Priyatin yang telah memberikan tempat meneduh selama KKN.
16. Pegawai di instansi yang dimintai data dan pengetahuan oleh penulis dan masyarakat Desa Kelet yang sudah berkenan terhadap penulis untuk memberikan informasi berkaitan dengan Desa Kelet terkhusus bapak petinggi, BPD, PKK, FKD, Karang Taruna, IPNU-IPPNU, Bank Sampah.

Tentu saja masih banyak pihak yang belum disebutkan oleh penulis, jadi mohon maaf dan terima kasih banyak. Penulis juga secara khusus meminta maaf kepada seluruh pihak diatas karena pastinya tidak luput dari kesalahan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

PERSEMBAHAN

Untuk Yang Terkasih:

Ibu Khuriyatun dan Bapak Ali Anwar

MOTTO

Only God Can Stop Us
(Fans Sriwijaya 2012)

وَحَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
(HR. Al-Qadlaa’iy dalam Musnad Asy-Syihaab no. 129, Ath-Thabaraaniy dalam Al-Ausath no. 5787).

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?"

(QS. Ar Rahman : 13)

ABSTRAK

Pembangunan (*development*) menjadi diskursus sosial. Dalam konteks pembangunan desa dimana desa menjadi subjek pembangunan negara di level bawah peran desa sangat strategis sebagai lokus pembangunan terkecil, karena pembangunan nasional saat ini dimulai dari desa. Desa memiliki permasalahan yang kompleks setelah dibukanya keran kebebasan lewat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Sustainable Development Goals* Desa adalah program atas penjabaran dari *Sustainable Development Goals* yang telah di sepakati oleh PBB serta di tetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 yang tertuang dalam RPJMN/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* desa, melalui ini pemerintah desa mendapat legitimasi dan dukungan dari pihak-pihak dalam melaksanakan tujuan pembangunan dan pengarusutamaan gender. peneliti memfokuskan pada dimensi gender, yaitu bagaimana perempuan terlibat dalam proses pembangunan desa dan apakah aspirasi perempuan sudah banyak diakomodir oleh kebijakan-kebijakan desa.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekata studi kasus dengan tujuan menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang gtelah terjadi denga mengumulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspirasi-aspirasi perempuan dalam pembangunan desa meliputi aspek kesehatan dan ekonomi. Partisipasi

perempuan dalam ruang formal bisa dikatakan ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam pembangunan desa, turut serta hadir dan menyampaikan aspirasi nya. Hanya saja dalam pemerintah desa semuanya laki-laki dan hanya perwakilan BPD yang ada partisipasi perempuannya. Tarik ulur kepentingan perempuan dalam bidang anggaran memang dirasa kurang dalam menunjang program-program yang di laksanakan oleh PKK dan proses lobbying biasa dilakukan oleh BPD maupun PKK.

Kata kunci : Aspirasi, Partisipasi, Perempuan, Pembangunan Desa

ABSTRACT

Development becomes a social discourse. In the context of village development where the village is the subject of state development at the lower levels, the role of the village is very strategic as the smallest locus of development, because current national development starts from the village. Villages have had complex problems since the opening of the tap for freedom through Law Number 6 of 2014. The Village Sustainable Development Goals are a program for the elaboration of the Sustainable Development Goals which have been agreed upon by the United Nations and stipulated in Presidential Decree No. 59 of 2017 as stated in the RPJMN/National Medium Term Development Plan. Gender equality is one of the objectives of the village's Sustainable Development Goals, through which the village government gains legitimacy and support from parties in implementing development goals and gender mainstreaming. researchers focused on the gender dimension, namely how women are involved in the village development process and whether women's aspirations have been accommodated by village policies.

This research is qualitative research with a case study approach to investigate and understand an event or problem that has occurred by gathering various kinds of information which are then processed to get a solution so that the problem that is revealed can be resolved. Collecting research data using interview techniques, observation, and documentation. While the analysis of the data used in this study uses analysis through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

The results of this study show that women's aspirations in village development include health and economic aspects. Women's participation in formal spaces can be said to participate in conveying their aspirations in village development, participating in being present and conveying their aspiratios. It's just that in the village government all men and only representatives of the BPD have women's participation. The tug-of-

war of women's interests in the budget sector is indeed felt to be lacking in supporting the programs implemented by the PKK and the lobbying process is usually carried out by the BPD and the PKK.

Keywords: Aspiration, Participation, Women, Village Development

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
PARTISIPASI, GENDER & POLITIK, DAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT</i>	17
A. Partisipasi	17
B. Gender dan Politik.....	21
C. <i>Sustainable Development</i>	25
BAB III.....	27
LANSKAP DESA KELET	27

A. Kondisi Geografis & Demografis Desa Kelet.....	27
B. Kondisi Sosial Dan Ekonomi.....	29
C. Kondisi Sosial Dan Politik.....	35
BAB IV	38
PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA KELET	38
A. Aspirasi Perempuan Di Desa Kelet.....	38
B. Kiprah Perempuan Di Bidang Sosial Dan Pemerintahan Di Desa Kelet.....	42
C. Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa	45
BAB V.....	55
PROGRAM-PROGRAM PRO PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA	55
A. Program-Program Pembangunan Pro Perempuan.....	55
B. Tarik-Ulur Kepentingan Perempuan Dalam Pembangunan Desa.....	58
BAB VI	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin dan Usia	28
Tabel 3.2: Jumlah Sarana Tempat Ibadah di Desa Kelet	30
Tabel 3.3: Jumlah Gedung Sekolah di Desa Kelet.....	31
Tabel 3.4: Jumlah Gedung Sekolah di Desa Kelet.....	31
Tabel 4 1: Aspirasi Perempuan PKK Desa Kelet.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Peta Wilayah Desa Kelet.....	28
Gambar 3.2 : Jembul Sedekah Bumi Desa Kelet	33
Gambar 3.3 : Pasar Desa Kelet	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan (*development*) menjadi diskursus sosial. Diskursus tersebut mirip seperti diskursus pertumbuhan (*growth*), perubahan sosial (*social change*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), pembebasan (*liberation*), pembaruan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*nation building*), pembangunan (*development*), pengembangan (*progress developing*), dan pembinaan (*construction*) (Hardjanto, 2011, p. 6). Singkatnya, pembangunan meliputi beberapa diskursus sosial, diantaranya adalah politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, institusi dan budaya. Fokus dari pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Secara kaidah, pembangunan memiliki arti yang positif yaitu membangun. Akan tetapi, pembangunan memiliki arti lain dalam kepentingan bagaimana orang, masyarakat dan negara memiliki tujuan mencapai pembangunan yang diharapkan sehingga kepentingan-kepentingannya dapat diakomodir (Warjio, 2016, p. 97).

Dalam konteks pembangunan desa dimana desa menjadi subjek pembangunan negara di level bawah peran desa sangat strategis sebagai lokus pembangunan terkecil, karena pembangunan nasional saat ini dimulai dari desa. Desa memanglah entitas yang seksi, desa selalu hadir dalam banyak diskusi dan pembicaraan di hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat paling bawah sampai kalangan elite (Iskandar, 2020, p. 21). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berhak dalam mengurus dan mengatur kelembagaan desa, kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat, hak asal-usul,

dan/atau hak adat yang dilegitimasi dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Singkatnya, desa adalah daerah yang memiliki kewenangan sendiri dalam merumuskan kebijakan desa.

Desa memiliki permasalahan yang kompleks setelah dibukanya keran kebebasan lewat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Data menunjukkan bahwasanya antara desa dan kota memiliki perbedaan yang cukup signifikan, data badan pusat statistik (BPS) per september 2020 memperlihatkan jarak antara kemiskinan perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi. Sementara presentase kemiskinan di kota sebesar 7,88 persen sedangkan di desa 13,20 persen (Pryanka, 2021, p. 1). Saat ini di Indonesia terdapat 83.843 desa dan memiliki 5.559 (7,55%) Desa Mandiri, 54.879 (74,49%) Desa Berkembang, dan 13.232 (17,96%) Desa Tertinggal. Pembangunan yang terjadi bukan hanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mencakup pembangunan yang berkelanjutan (BPS, 2021, p. 1).

Dalam segi pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan tidak hanya bertujuan pada masyarakat perkotaan akan tetapi pembangunan berkelanjutan harus ditetapkan di level desa. Pasal 78 Undang-undang tentang desa yang berbunyi, “Pembangunan desa meningkatkan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian yang efisien, pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna, dan peningkatan ketertiban serta ketentraman di pedesaan”.

Prinsip *SDGs / Sustainable Development Goals* digunakan dalam pembangunan berkelanjutan yaitu universal, integrasi dan inklusif. *Sustainable Development Goals* Desa adalah program atas penjabaran dari *Sustainable Development Goals* yang telah di sepakati oleh PBB serta di tetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 yang tertuang dalam RPJMN/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. *Sustainable Development Goals*

memiliki 17 tujuan atau *goals* di antaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat serta sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih serta sanitasi yang memadai, energi yang bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, penemuan dan infrastruktur industri, pengurangan ketimpangan, kota serta pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi serta bertanggung jawab produksi, memerangi perubahan iklim, ekosistem bahari, ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan institusi berkelanjutan, kemitraan untuk tujuan (Iskandar, 2020, p. 13).

Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan desa, melalui ini pemerintah desa mendapat legitimasi dan dukungan dari pihak-pihak dalam melaksanakan tujuan pembangunan dan pengarusutamaan gender. Tujuan dari kesetaraan gender adalah terbentuknya kondisi yang mewujudkan seluruh masyarakat desa dalam posisi adil, dalam segi kehidupan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Indikator tercapainya tujuan *Sustainable Development Goals* Desa adalah terciptanya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa, baik sebagai aparatur desa maupun dalam badan permusyawaratan desa (BPD), layanan kesehatan untuk perempuan, layanan pendidikan untuk perempuan, serta keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Iskandar, 2020, p. 119).

Pembahasan “kesetaraan gender” beberapa kali ditafsirkan sebagai pengalihan tugas laki-laki kepada perempuan. Jika ini terjadi, maka tidak akan ada “kesetaraan”, melainkan tambahan beban penderitaan bagi perempuan. Keadilan dan kesetaraan gender melihat bagaimana orang berpikir dan bertindak dan melihat semua orang sama dan seimbang. Bagaimana laki-laki dan perempuan seimbang untuk proses pengambilan kebijakan, menerima peluang dan kesempatan serta menerima kesetaraan dalam pelaksanaan

pembangunan (De-Vries, 2006). Selain perlakuan yang adil, perempuan di desa dijamin kesempatan yang sama dalam urusan publik. Mencapai tujuan keberlanjutan desa juga membutuhkan penghapusan semua kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Q.S Al Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah maha mngetahui lagi maha mengenal”.

Karena itu, pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan juga menarik beberapa sarjana untuk melakukan kajian. Beberapa kajian lebih banyak mengkaji soal keterlibatan perempuan dan fokus terhadap faktor penghambat dan pendorong partisipasi perempuan di level desa. Seperti studi Rahmawati (2019) yang mengkaji keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa dan menganalisis apa saja faktor penghambur dan pendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Studi lain dilakukan Monica (2017) yang mendeskripsikan hubungan perempuan dari pengembangan desa dan faktor penghambat keterlibatan perempuan di pembangunan desa. Kemudian, studi Djumati dkk (2015) mengkaji mengenai sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa.

Sayangnya, studi di atas hanya memfokuskan kepada faktor penghambat dan pendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan di tingkat desa serta peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengawasan kebijakan-kebijakan desa dalam mewujudkan kesetaraan di dalam

masyarakat desa. Studi ini hendak memperkaya penelitian-penelitian di atas, yaitu dengan memberikan fokus bagaimana desa menerapkan *SDGs* dalam pembangunan desa. Hanya saja peneliti memfokuskan pada dimensi gender, yaitu bagaimana perempuan terlibat dalam proses pembangunan desa dan apakah aspirasi perempuan sudah banyak diakomodir oleh kebijakan-kebijakan desa.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kelet, kecamatan keling, kabupaten jepara. Desa Kelet merupakan desa mandiri menurut Indeks Desa Membangun (IDM) (Kemendes, 2020). Indeks Membangun Desa menilai desa dengan menggunakan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Keberlanjutan Ekonomi, serta Indeks Kelestarian Lingkungan. Status kemandirian desa merupakan ukuran untuk mengelompokkan desa yang dengannya intervensi, anggaran dan kebijakan pembangunan desa dapat ditentukan. Indeks Desa Membangun dapat dijadikan sebagai tolak ukur informasi dasar untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan desa berkelanjutan. Desa Kelet memiliki total masyarakat sebesar 10.254 jiwa terdiri dari 5.080 jiwa masyarakat laki-laki dan 5.174 jiwa masyarakat perempuan ada lebih dari 50,4% persentase perempuan di Desa Kelet dan pemangku kebijakan di pemerintahan desa didominasi oleh laki-laki. Penelitian ini penting dilakukan guna menambah khazanah pengetahuan terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan desa dan memberikan pengetahuan sejauh mana desa-desa di indonesia khususnya di wilayah Desa Kelet menerapkan *SDGs* dalam proses pembangunan dalam dimensi gender.

B. Rumusan Masalah

Melihat latarbelakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apa aspirasi perempuan terkait pembangunan di Desa Kelet?
2. Bagaimana peran perempuan untuk memperjuangkan aspirasinya tersebut dalam pembangunan di Desa Kelet?
3. Bagaimana dampak peran perempuan terhadap kualitas program-program perempuan di Desa Kelet?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, tujuan yang akan di teliti adalah:

1. Untuk mengetahui apa aspirasi perempuan terkait pembangunan di Desa Kelet
2. Untuk mengetahui sejauh mana terkait peran perempuan untuk memperjuangkan aspirasinya dalam pembangunan Desa Kelet
3. Untuk mengetahui lebih dalam dampak peran perempuan terhadap kualitas program-program perempuan di Desa Kelet

D. Manfaat Penelitian

Melihat tujuan penelitian diatas, selanjutnya manfaat penelitian yang diharapkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis, setidaknya dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan khususnya FISIP UIN Walisongo Semarang, serta pemerintah dan masyarakat terkait perempuan dan pembangunan desa dari perspektif *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dan meningkatkan pemahaman dan mungkin memberikan gambaran bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan referensi untuk menangani permasalahan serupa.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini semoga menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang perempuan dan pembangunan desa perspektif *Sustainable Development Goals* / tujuan pembangunan berkelanjutan.

c. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini semoga menjadi kajian pertimbangan dalam perencanaan pembangunan desa melihat dari partisipasi perempuan dalam perspektif *Sustainable Development Goals* / tujuan pembangunan berkelanjutan.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai partisipasi perempuan dalam perspektif *Sustainable Development Goals* / tujuan pembangunan berkelanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kajian teoritis dan referensi yang berdekatan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penggunaan referensi yang sudah diterbitkan sebelumnya memberikan peneliti wawasan tambahan dalam memandang situasi sosial yang dekat dengan permasalahan. Hasil dari beberapa penelitian yang berbeda dan penelitian sebelumnya sangat diperlukan dan dapat digunakan untuk mendukung hasil penelitian yang ditemukan. Temuan penelitian dari tinjauan pustaka ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama

berkaitan dengan partisipasi perempuan dan kedua perempuan dan implementasi pembangunan.

1. Partisipasi Perempuan

Studi Monica dkk (2017) “Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di kecamatan Candi”. Studi ini mendeskripsikan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa dan hambatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan serta kontribusi perempuan dalam perencanaan cukup besar, walaupun tidak ada anggota perempuan di pemerintah desa, namun dalam perencanaan pembangunan desa khususnya dalam penguatan masyarakat, keterlibatan perempuan begitu besar. Partisipasi serta kontribusi perempuan khususnya dalam pembangunan telah banyak didominasi oleh perempuan dan beberapa hambatan hanya bersifat teknis dan tidak mempengaruhi besarnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Studi dari Skripsi yang ditulis oleh Hadi (2015) “Analisis gender dalam perencanaan pembangunan desa, di desa sumberagung kecamatan sumberbaru kabupaten jember tahun 2015”. Studi tersebut mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di desa sumberagung kecamatan sumberbaru kabupaten jember dan lebih fokus pada keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Fokus dari kajian tersebut adalah keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan dan mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam merencanakan pembangunan desa. Hasil studi memperlihatkan terdapat perbedaan sebagian pembangunan desa dan perencanaan pembangunan desa tidak dilaksanakannya beberapa bagian dalam perencanaan di desa sumberagung berdampak pada partisipasi perempuan.

Studi dari Rahmawati (2019) dengan judul “partisipasi perempuan dalam perencanaan” menganalisis tentang keterlibatan perempuan dalam perencanaan

desa serta menganalisis faktor penghambat dan pendorong keterlibatan perempuan dari perencanaan pembangunan. Beberapa faktor penghambat pembangunan desa seperti hambatan fisik topografi wilayah desa, hambatan sosial budaya dan rendahnya pendidikan bagi masyarakat dan hambatan ekonomi dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat desa.

Studi jurnal dari Djumati (2015) dengan judul “partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di kecamatan kao utara kabupaten halmahera utara” mengkaji mengenai bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa serta memfokuskan kepada sejauh mana peran perempuan dalam pembangunan dan bagaimana perempuan terlibat dalam proses pembangunan. Peran perempuan dalam pembangunan baik sebagai entitas perempuan maupun istri atau Ibu dalam pembangunan bisa dalam berbagai sektor misalnya dalam perencanaan atau pengawasan atau bahkan sebagai bagian dalam hasil pembangunan

Studi skripsi dari Kurniati (2018) yang berjudul “Peran perempuan dalam pembangunan desa di kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhan batu selatan” mengkaji tentang peran dalam pembangunan desa di kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhan batu selatan dan lebih fokus kepada peran serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. di mana peran perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Kampung memiliki peran serta partisipasi dalam membangun desa sebagaimana dalam undang-undang yang menyatakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

2. Perempuan dan Implementasi Pembangunan

Studi dari Tazkia dkk (2022) dengan judul “Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan di kabupaten pandeglang menerapkan analisis model implementasi kebijakan van metter dan van horn. beberapa

aspek yang belum mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang diantaranya sumber daya manusia yang belum memadai, anggaran fasilitasi pengarusutamaan gender yang terbatas, jumlah sumber daya manusia penggerak pengarusutamaan gender yang tidak sebanding dengan cakupan luas wilayah kabupaten pandeglang.

Studi jurnal dari Alfirdaus (2018) yang berjudul menajamkan perspektif gender, memberdayakan perempuan dan mencapai *SDGS (Sustainable Development Goals)* meneliti tentang implementasi pembangunan dan penajaman perspektif gender dalam menguatkan strategi pemberdayaan kaum perempuan. Implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan belum mencapai pada taraf keadilan gender dalam beberapa upaya penguatan strategi Pemberdayaan Kaum perempuan telah diupayakan oleh berbagai kalangan termasuk pemerintah.

Studi jurnal dari Rahmawati (2020) dengan judul “Implementasi undang-undang desa no. 6 tahun 2014 tentang penyetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan desa. Meneliti tentang kebijakan yang menjadi waktu bagi perempuan desa untuk mengusahakan peraan dan kontribusinya dalam mengubah statusnya dari objek menjadi subjek pembangunan desa. Dalam rangka mengubah posisi perempuan dari objek menjadi subjek pembangunan desa harus memiliki upaya di dalam kebijakan-kebijakan yang akan menjadi momentum perempuan Desa dalam mengoptimalkan perannya penyetaraan gender menjadi implementasi dari undang-undang desa tentang keadilan gender.

Studi jurnal dari Sigit (2020) dengan judul isu pemberdayaan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa meneliti tentang pandangan masyarakat terhadap isu pemberdayaan perempuan yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Pandangan masyarakat terhadap isu pemberdayaan perempuan masih didominasi oleh patriarki dengan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan desa yang sedang

diupayakan dalam mencapai pemberdayaan perempuan dalam lingkup pembangunan desa.

Studi jurnal Diah dkk (2022) dengan judul Desa Ramah Perempuan: Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa Sumberpakem dalam Implementasi *SDGs* meneliti tentang implementasi *SDGs* dalam upaya untuk mewujudkan sasaran *SDGs* kelima yaitu pelibatan perempuan dalam pembangunan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kelima yaitu keadilan gender serta dalam mencapai desa ramah perempuan dalam pengembangan kapasitas perempuan dan bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Penelitian diatas memfokuskan kepada faktor penghambat dan pendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan di level desa serta peran dan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan-kebijakan Desa dalam mewujudkan kesetaraan di dalam masyarakat desa. Penelitian ini hendak memperkaya penelitian-penelitian diatas, yaitu dengan memberikan fokus bagaimana desa menerapkan *SDGs* dalam pembangunan desa dan peneliti memfokuskan pada dimensi gender, bagaimana perempuan terlibat dalam proses pembangunan desa dan apakah aspirasi perempuan sudah banyak diakomodir oleh kebijakan-kebijakan desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Pendekatan ini memperlakukan latar belakang dan orang secara holistik (secara keseluruhan), bukan memisahkan orang menjadi hipotesis atau variabel,

tetapi melihat mereka sebagai bagian dari keseluruhan. Menurut pandangan ini, Kirk dan Miller (1990:3) mengartikan bahwa penelitian kualitatif merupakan diskursus ilmu sosial yang pada dasarnya menekankan pada tafsiran orang-orang di wilayah mereka dan berinteraksi dengan masyarakat dalam bahasa dan terminologi mereka. (Nugrahani, 2014, p. 8).

Menurut Sutopo (2002:136) mengingat keterbatasan penelitian kualitatif, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah studi kasus, dengan kata lain penelitian kontekstual yaitu penelitian yang didasarkan pada karakteristik tertentu dari penelitian dan kesimpulan yang tidak mencoba untuk digeneralisasikan.

Menurut Yin (2000:65-85) dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat berinteraksi dengan pertanyaan teoritis yang sedang diselidiki serta dapat mengumpulkan informasi. Selain itu, berbagai jenis bukti penelitian dari peristiwa nyata dapat digunakan. Studi kasus dapat memberikan gambaran secara detail dan komprehensif tentang kondisi yang ada kaitannya dengan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan kejadian di wilayah penelitian. Meskipun jenis studi kasus ini terfokus pada penggambaran proses 5W 1H bagaimana suatu hal terjadi guna mengacu pada penafsiran tentang arti dari masalah yang diteliti (Nugrahani, 2014, p. 92).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan sesuatu darimana informasi diperoleh. Data yang dihasilkan merupakan data primer. Sumber informasi pendukung dan tambahan disebut sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah informasi dari sumber utama informasi (informan), yaitu pemerintah Desa Kelet sebagai penyelenggara pembangunan desa,

masyarakat desa sebagai penyelenggara pembangunan desa, dan catatan lapangan dikaitkan dengan rumusan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan siapa yang menguasai informasi, siapa yang memiliki informasi, dan siapa yang mau memberikan informasi

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dihasilkan melalui orang lain yang tidak dihasilkan secara langsung dari data primer. Informasi yang dihasilkan dari sumber kedua disediakan oleh pengumpul data. Hasil dari sumber kedua guna mendukung data primer seperti buku, resensi, literatur, foto, kajian atau sumber yang lain yang serupa dengan pembangunan desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan untuk memecahkan masalah, teknik berikut yang diterapkan adalah:

a) Wawancara

Dalam wawancara penelitian ini peneliti memasukkan sesi tanya jawab bersama masyarakat atau pihak yang dekat dengan masalah untuk berdiskusi menggunakan teknik wawancara antara lain dengan kepala Desa Kelet, sekretaris Desa Kelet, kepala urusan perencanaan Desa Kelet, kepala urusan keuangan Desa Kelet, kepala urusan kesejahteraan Desa Kelet, badan permusyawaratan Desa Kelet, PKK Desa Kelet, organisasi di Desa Kelet, dan masyarakat Desa Kelet

b) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dimana gejala yang akan dipelajari dicatat sistematis (Usman dan Purnomo, 2004). Observasi merupakan teknik pengumpulan data jika: (1) berkaitan dengan tujuan penelitian, (2) disusun dan

ditetapkan secara terstruktur, dan (3) kondisinya (reliabilitas) dan kebenarannya (validitas) dapat dipantau. Observasi merupakan proses kompleks yang terdiri dari proses biologis dan psikologis. Saat menggunakan teknik observasi, urgensi menggunakan penglihatan dan ingatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari lapangan, menjadi partisipan langsung dalam objek penelitian, yaitu. pembangunan Desa Kelet (Hardani, 2020, p. 123).

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pendataan informasi dan menghasilkan dokumen-dokumen yang dapat diperoleh dan dipertimbangkan sehingga menjadi bukti konkret. Dokumentasi seperti pengumpulan data dalam bentuk pencatatan merupakan objek pengumpulan data dengan mempertimbangkan tiga jenis sumber yaitu kertas, tempat dan orang. Metode ini digunakan untuk menghasilkan informasi, dokumen tertulis atau informasi lain yang dapat memengaruhi perkembangan Desa Kelet.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode dimana para peneliti dapat mengelola data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan tentang penelitian mereka, analisis data merupakan hal yang sangat penting dari metode ilmiah, dikarenakan dengan bantuan analisis, data lebih bermakna serta berarti dalam menemukan hasil.

Penelitian ini menerapkan teknis analisis data yaitu:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu pengolahan dimana data informasi disederhanakan, data yang diperoleh kemudian di olah ke dalam bentuk laporan, yang kemudian dipadatkan dan difokuskan pada isu-isu penting. Tema

dan sistem yang terorganisir secara terstruktur. Data yang padatkan memberikan suatu hasil yang tajam dan juga memudahkan untuk menemukan hasil.

b) Penyajian Data

Penyajian materi dilakukan untuk melihat gambaran umum dari pekerjaan penelitian atau bagian-bagian tertentu, untuk membuat deskripsi deskriptif dari masalah yang dikaji.

c) Verifikasi

Hipotesis yang ditampilkan masih bersifat sementara dan pasti berubah jika tidak ada data yang kuat untuk mendukung data pada sesi selanjutnya. Namun, jika kesimpulan ditarik pada sesi awal dan di buktikan dengan valid, maka saat peneliti mengambil data di lapangan, kesimpulan yang ditarik dapat diterima.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi perlu di gambarkan rancangan sistematika penulisan guna memberikan urutan dalam struktur penelitian, sistematika penulisan terdiri dari tiga bagian, antara lain yaitu bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Oleh karena itu, pembagian sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Pada awal skripsi memuat halaman judul, nota pembimbing, lembar pengesahan, lembar pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, halaman abstrak, daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran

Pembahasan bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Pembahasan bab II berisi tentang teori partisipasi, gender dan politik, dan *sustainable development goals*.

Pembahasan bab III berisikan mengenai lanskap Desa Kelet, sub bab terdiri dari geografis dan demografis, kondisi sosial dan ekonomi, kondisi sosial dan politik.

Pembahasan bab IV berisi tentang perempuan dan pembangunan di Desa Kelet, sub bab terdiri dari aspirasi perempuan di Desa Kelet, kiprah perempuan dibidang sosial dan pemerintahan di Desa Kelet, dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

Pembahasan bab V berisi tentang aspirasi dan pembangunan desa, sub bab terdiri dari program-program pembangunan pro perempuan, dan tarik ulur aspirasi perempuan.

Pembahasan bab VI berisi penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PARTISIPASI, GENDER & POLITIK, DAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

A. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Secara bahasa, partisipasi berasal dari kata latin *pars* yang berarti bagian dan *capere* yang berarti mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi untuk berpartisipasi berarti untuk berpartisipasi atau mengambil bagian dalam kegiatan politik atau kegiatan negara (Josep, 2018, p. 7). Partisipasi politik adalah tindakan yang dapat diamati atau perilaku eksternal individu warga negara, bukan perilaku internal yang berupa sikap dan kecenderungan. Hal ini harus ditekankan sebab sikap dan keinginan tidak selalu tercermin dalam perilakunya. Kedua, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memengaruhi pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan politik. Pengertian ini mencakup tindakan yang mengusulkan kebijakan publik alternatif, pembuat dan pelaksana kebijakan alternatif, dan tindakan yang mendukung atau menentang keputusan kebijakan pemerintah. Ketiga, konsep partisipasi politik mencakup tindakan-tindakan yang berhasil/efektif dan non-pemerintah. Keempat, tindakan yang bertujuan memengaruhi pemerintah secara langsung atau tidak langsung melalui perantara individu (Subakti, 2010, p. 181).

Partisipasi dalam politik merupakan aktivitas masyarakat yang berlaku sebagai individu dan berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi ini bisa individu atau kolektif, terorganisir atau mendadak, damai atau kekerasan, resmi atau tidak resmi. Usaha dalam memengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah dapat mengikutsertakan usaha membujuk atau menekan

pejabat untuk bergerak atau tidak bergerak dengan cara tertentu atau partisipan bisa berusaha untuk mengganti keputusan waktu itu dengan orang lain yang diharapkan lebih cepat dalam memberikan kerja nyata dalam mewujudkan keinginan partisipan (Huntington, 1994, p. 7).

2. Jenis Partisipasi

Partisipasi dalam politik bisa terwujud dalam berbagai bentuk studi tentang Keterlibatan dan dapat digunakan skema klasifikasi yang berbeda-beda namun kebanyakan studi akhir-akhir ini membedakan beberapa jenis perilaku sebagaimana berikut :

Pertama kegiatan pemilihan melaksanakan beberapa sumbangan-sumbangan dan mencakup suara dalam bekerja dalam suatu pemilihan guna mencari dukungan bagi seorang calon dan tujuan mempengaruhi hasil proses pemungutan suara agar lebih luas dibandingkan dengan bentuk keterlibatan politik lainnya karena itu faktor-faktor yang bersangkutan dalam kejadian itu beberapa ada yang membedakan dari jenis-jenis partisipasi termasuk dalam acara kampanye dan kumpulan kegiatan yang berkaitan dan difokuskan dalam putaran pemilihan dan pengambilan suara yang jelas dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk dari partisipasi politik.

Kedua lobbying masuk dalam usaha perorangan atau kelompok dalam menemui pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemimpin politik atau pejabat pemerintah dalam persoalan orang banyak sebagai yang ditunjukkan untuk menimbulkan dukungan dari oposisi terhadap keputusan tertentu.

Ketiga kegiatan organisasi yang menyangkut keterlibatan sebagai pejabat maupun pemimpin politik dalam suatu lembaga yang bertujuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah seperti dalam memusatkan usaha-usahanya dalam kepentingan yang khusus atau dapat

memberikan perhatian kepada persoalan umum yang banyak menjadi permasalahan untuk menjadi anggota organisasi demikian merupakan suatu bentuk keterlibatan politik tidak peduli apakah orang itu ikut atau tidak dalam kerja kerja organisasi itu dalam mempengaruhi pemerintah yang tidak aktif dan tanggap sebagai keterlibatan melalui orang lain.

Keempat mencari koneksi adalah kegiatan dari perorangan yang ditujukan oleh pejabat pemerintah maupun pemimpin politik dengan maksud memperoleh benefit bagi orang itu saja atau dari orang dalam mencari koneksi khusus adalah salah satu cara keterlibatan politik yang berbeda dan hampir tak ada hubungannya dengan cara-cara lain seperti kegiatan pemilihan lobi dan organisasi.

Kelima tindakan kekerasan adalah bentuk keterlibatan politik dan untuk keperluan kajian dalam manfaatnya untuk mengartikan sebagai indikator tersendiri sebagai upaya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang pejabat atau pemimpin politik dengan mengadakan kegiatan ilegal seperti huru-hara, pemberontakan atau mengubah seluruh sistem politik atau revolusi (Huntington, 1994, pp. 16-18).

Mengapa harus terdapat hubungan antara pembangunan sosial ekonomi dengan keterlibatan politik pada tahapan yang luas terlihat adanya koreksi antara kedua faktor yang dimaksud :

Pertama di dalam masyarakat keterlibatan politik cenderung beraneka ragam dengan status sosial ekonomi dan pendidikan yang lebih tinggi berpenghasilan besar dan mempunyai pekerjaan yang mapan biasanya lebih mendukung kerja kerja keterlibatan partisipatif daripada mereka yang kurang dalam pendidikan pekerjaan dan berstatus rendah dalam pembangunan ekonomi gejala masyarakat dalam meningkatnya kadar melek huruf pendidikan

dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kelas menengah oleh sebab itu masyarakat yang berkontribusi di dalam politik menjadi lebih banyak.

Kedua pembangunan sosial dan ekonomi memperlihatkan tekanan antar kelompok yang berkepentingan dengan bermunculan kelompok dari kelompok sosial atas mulai terancam dengan kelompok sosial yang bawah melalui kesempatan dalam merubah nasib mereka karena akibat dari huru-hara konflik antar kelas sosial di daerahnya masing-masing kelompok komunal dan konflik meningkat secara tajam dikarenakan beberapa kasus menyadarkan kelompok yang akhir-akhir ini memunculkan tindakan kolektif oleh suatu kelompok untuk melindungi aspirasinya terhadap kelompok lain dan kelompok tersebut diharuskan untuk terjun langsung dalam dunia politik.

Ketiga perekonomian yang rumit menimbulkan terciptanya dan terbentuknya organisasi-organisasi serta bermunculannya beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam kelompok-kelompok tersebut seperti perkumpulan petani perkumpulan nelayan dan buruh organisasi tersebut adalah ciri-ciri yang terlihat dalam masyarakat yang lebih maju

Keempat pembangunan ekonomi bagi sebagian menggunakan sebagian penghasil perluasan dari tugas dan fungsi pemerintah dalam skala kegiatan pemerintah serta terus terang menganut ekonomi liberal yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat dengan paham agraris yang diperintah oleh seorang sosialis itu memerlukan banyak promosi dan redistribusi bagi pemerintah

Kelima modernisasi sosial ekonomi adalah bentuk pembangunan negara-negara adalah paham modernisasi sosial ekonomi oleh sebab itu orang atau kelompok yang berhubungan dengan negara itu menjadi sangat penting dalam identitasnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari negara bahkan terlihat menyampingkan loyalitas atau kesediaan secara teori bisa dikatakan sebagai konsep kenegaraan kiranya menyampingkan perbedaan kelas-kelas

maupun kelompok komunal serta memberikan ruang dalam berpartisipasi dalam politik secara luas bagi warga yang berkedudukan di depan negara memiliki tanggung jawab minimal para aktivis atau tokoh negara kehilangan awal modernisasi sosial ekonomi memiliki kebudayaan dan pandangan politik yang memudahkan dalam masyarakat memperoleh partisipasi politik (Huntington, 1994, pp. 60 - 61).

B. Gender dan Politik

1. Konsep Gender

Salah satu bahasan yang penting dimengeti dalam membahas isu perempuan adalah perbedaan antara seks dan gender. Dalam bahasan perbedaan seks dan gender perlu dipahami sebelum membahas kesetaraan gender yang berdekatan dengan permasalahan sosial yang di perempuan. Kemudian seks merupakan perbedaan kodrati yang tak bisa dipertukarkan antara dua jenis kelamin manusia perempuan dan laki-laki. Contohnya, tipe laki-laki adalah orang yang memiliki atau menyerupai daftar berikut: orang yang memiliki penis, yang memiliki jakala (kala menjing), dan yang menghasilkan air mani. Meskipun wanita mempunyai organ reproduksi seperti rahim dan jalan lahir, mereka menghasilkan telur, memiliki vagina dan memiliki sarana untuk menyusui. Sedangkan gender merupakan ciri laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan budaya. Misalnya, bahwa seorang wanita dikenal emosional, lembut, cantik. Pria dipandang kuat, rasional, maskulin, keren. Hal tersebut dapat dipertukarkan (Fakih, 1996, p. 8).

Gender merupakan rekontruksi sosial sebagaimana meliputi perilaku, sifat, sikap manusia yang dapat dipelajari sesuai dengan kemampuan laki-laki maupun perempuan dan ditentukan oleh sosial dan budaya. Perbedaan

pandangan terhadap perempuan bertentangan dengan hak asasi manusia terutama hak perempuan. Maka pengembangan dan pemberdayaan perempuan sangat diharapkan supaya perempuan bisa memperjuangkan aspirasinya ini selama masih ada (Saldi, 2010).

Peran gender merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki sesuai dengan status sosial dan budaya serta struktur di dalam masyarakat peran tersebut diberikan dalam setiap masyarakat maupun kelompok sosial yang disiapkan sebagai peran perempuan maupun laki-laki titik ada empat peran gender :

Peran Produktif gender adalah peran yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan sesuai status sosial serta budaya dan struktur masyarakat dan peran tersebut diberikan dalam setiap struktur masyarakat maupun komunitas atau kelompok sosial yang dipersepsikan sebagai peran perempuan maupun laki-laki atau peran laki-laki maupun perempuan yang dibedakan hanya peran produktif dan reproduktif

Peran reproduktif bisa dibagi dalam dua kategori yaitu biologi dan sosial reproduksi biologi mengacu kepada hal-hal yang berbau biologi seperti melahirkan, menyusui dan reproduksi sosial merujuk pada aktivitas dalam mengasuh maupun merawat dan bertahannya hidup manusia di dalam aktivitas keluarga reproduksi ialah aktivitas yang menciptakan tenaga kerja manusia dalam mengasuh anak memasak memberi makan mencuci yang mengalir dalam aktivitas rumah tangga adalah termasuk dalam kategori ini.

Peran sosial dalam kegiatan masyarakat mengacu pada aktivitas yang digunakan dalam menjalankan kehidupan masyarakat peran masyarakat dijalankan perempuan ialah melakukan aktivitas misalnya pelayanan kesehatan di posyandu keterlibatan dalam kegiatan sosial budaya semua kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara sukarela (Bhasin, 2001).

2. Konsep Politik

Ilmu politik adalah studi tentang politik atau kebijakan. Politik adalah mengejar keamanan dalam hidup. Dalam pepatah Indonesia kita mengenal gemah ripah loh jinawi. Orang Yunani kuno, terkhusus Plato dan Aristoteles, memberinya nama *en dam onia* atau kehidupan yang baik.

Politik adalah suatu usaha untuk membuat kebijakan yang dapat diterima oleh kebanyakan masyarakat, untuk mengakomodir masyarakat menuju kebersamaan. Usaha guna menciptakan kehidupan yang lebih baik melibatkan aktivitas yang mencakup pendefinisian tujuan dan pendefinisian sarana guna mencapai tujuan tersebut. Masyarakat memutuskan apa tujuan dari sistem politik dan itu menyiratkan memilih di antara beberapa opsi dan memprioritaskan tujuan yang ditetapkan (Budiarjo, 2008, p. 15).

Singkatnya politik ialah perebutan kepemimpinan, tahta dan harta di bawah ini ada dua sarjana yang menguraikan pengertian politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus pertama menurut Rord Haque At Al ialah aktivitas yang menyangkut Bagaimana kelompok tersebut mencapai keputusan dan kebijakan yang bersifat bersama dan mengikat melalui usaha dalam menyatukan perbedaan-perbedaan di antara anggota kedua menurut Andre Heywood politik adalah kegiatan bangsa yang bertujuan dalam membuat kebijakan dan mempertahankan serta mengamandemen peraturan umum yang mengatur kehidupan masyarakat yang berarti tidak terlepas dalam konflik dan kerjasama

di samping itu ada pengertian lain yang lebih bersifat pragmatis dalam perbedaan definisi yang kita jumpai karena setiap sarjana memiliki perspektif maupun pandangan yang berbeda dari unsur politik sebagai konsep pokok yang dipakai dalam meneropong perspektif lain yang bisa kita simpulkan bahwa konsep pokok itu adalah negara kekuasaan pengambilan keputusan kebijakan dan pembagian atau alokasi (Budiarjo, 2008, p. 16).

3. Relasi Gender dan Politik

Relasi politik dan gender ialah menentukan kebijakan yang mendukung dan searah dengan perempuan tanpa diskriminatif apapun dan perempuan menjadi objek utama dalam kebijakan-kebijakan baik di bidang politik maupun sosial budaya relasi gender dan politik bukan hanya menganalisis mengenai perbedaan gender maupun pemberdayaan gender namun relasi gender dan politik juga menganalisis gender dan diskriminasi serta tidak merebutkan posisi gender di dalam masyarakat, kesetaraan gender bisa dilihat dari keterlibatan perempuan dalam upaya menciptakan kepentingan politik perempuan oleh karena itu jumlah parlemen perempuan masih sangat terbatas maka perempuan memiliki kemampuan untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan maupun aspirasi artinya jenis kelamin perempuan yang dinyatakan dalam kebijakan kuota 30% adalah penentu bagi representasi perempuan di dalam parlemen titik urgensi untuk meningkatkan keterlibatan politik perempuan menemukan momentum dengan jumlah perempuan dalam partisipasi politik sebagai indikator dari keadilan gender di dalam (*Sustainable Development Goals*) (Rasyidin, 2016).

4. Gender Pathway

Gender pathway ialah suatu analisis gender yang digunakan dalam melakukan pengarusutamaan gender di dalam perencanaan kebijakan pembangunan dengan menggunakan gender pathway para pemangku kebijakan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus dapat menyusun kebijakan pembangunan yang ditujukan guna menghilangkan atau menghapus kesenjangan gender tersebut terdapat sembilan langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan gender pathway langkah tersebut dibagi dalam tiga tahap yang pertama analisis kebijakan yang

responsif gender, tahap formulasi kebijakan yang responsif gender dan tahap pengukuran hasil dengan analisis gender model gender pathway maka setiap pemangku kebijakan dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif gender sesuai tugas dan fungsinya (Bappenas, 2001)

C. Sustainable Development

1. Sustainable Development Goals

Pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang baru di perbincangkan. Singkatnya, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai “*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Istilah ini diperkenalkan oleh *The world commission on environment and development / WCED* dalam *Our Common Future* pada tahun 1987.

Dalam kehadirannya pembangunan berkelanjutan memiliki banyak definisi diantaranya adalah pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat di berbagai belahan dunia baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, tanpa menggunakan sumber daya alam yang melebihi batas.

Hal-hal yang perlu diketahui adalah penekanan terhadap hal prinsip pembangunan berkelanjutan, pertama komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan, di mana masyarakat termiskin di dunia harus diprioritaskan dan kebijakan harus melihat masa depan. Kedua sebagai pandangan jangka panjang yang menitikberatkan pada prinsip kewaspadaan, yaitu ketika ada hal serius atau sesuatu yang tidak dapat dicegah, kurangnya kepastian informasi yang lengkap tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan dalam mencegah pencemaran lingkungan. Ketiga pembangunan berkelanjutan memahami dan

mengintegrasikan serta beroperasi dalam hubungan kompleks diantara lingkungan, ekonomi, serta masyarakat. Lingkungan, pembangunan ekonomi dan keadilan sosial merupakan trilogi aspek utama pembangunan berkelanjutan (Stiglitz, 2011, p. 70).

Sustainable Development Goals (SDGs) ialah persetujuan pembangunan berkelanjutan secara global ditetapkan oleh PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) di 25 September 2015. SDGs yaitu aksi global yang direncanakan mencapai 17 tujuan dan 169 target untuk 15 tahun kedepan, terhitung sejak 2016 hingga 2030. di antaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat serta sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih serta sanitasi yang memadai, energi yang bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, penemuan dan infrastruktur industri, pengurangan ketimpangan, kota serta pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi serta bertanggung jawab produksi, memerangi perubahan iklim, ekosistem bahari, ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan institusi berkelanjutan, kemitraan untuk tujuan (Iskandar, 2020, p. 13).

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan poin kelima tentang kesetaraan gender memiliki beberapa indikator tercapainya tujuan *Sustainable Development Goals* Desa salah satunya adalah terciptanya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa, baik sebagai aparatur desa maupun dalam badan permusyawaratan desa (BPD), layanan kesehatan untuk perempuan, layanan pendidikan untuk perempuan, serta keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Iskandar, 2020, p. 119).

BAB III

LANSKAP DESA KELET

A. Kondisi Geografis & Demografis Desa Kelet

1. Kondisi Geografis

Desa Kelet ialah salah satu desa yang berada di kecamatan keling kabupaten jepara yang memiliki status desa mandiri dan mengalami peningkatan dari desa maju ke desa mandiri. Wilayah ini dulunya adalah hutan pohon karet dan lama-kelamaan masyarakat menamai daerah tersebut daerah karet seiring perjalanan waktu masyarakat menyebut kata karet menjadi kelet. Luas wilayah Desa Kelet adalah 437,329 Ha tepatnya di lereng gunung muria dan berbatasan langsung dengan kabupaten pati. Batas wilayah Desa Kelet ialah sebagai berikut :

Sebelah timur : Desa Mojo (Kab. Pati)

Sebelah barat : Desa Jlegong

Sebelah selatan : Desa Damarwulan

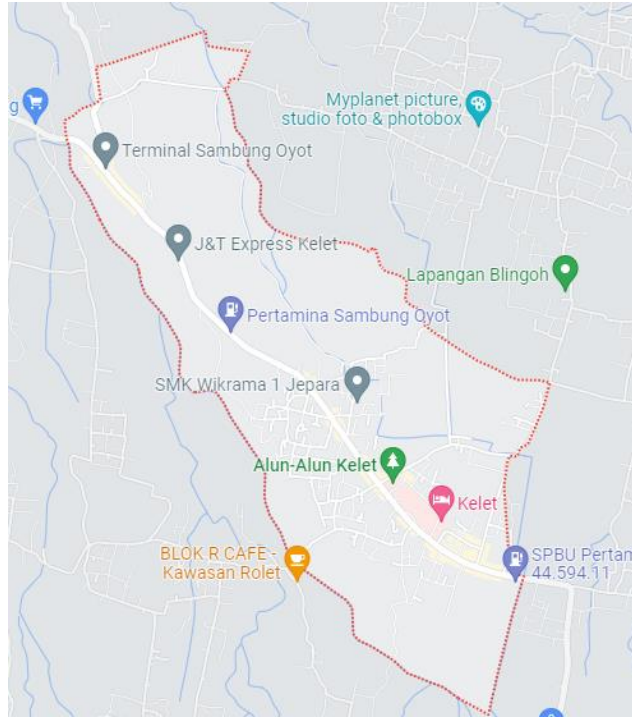
Sebelah utara : Desa Blingoh

Untuk menuju ke Desa Kelet bisa ditempuh dua jalur, jika di tempuh dari jepara akan melewati mlonggo, bangsri, kembang, keling kemudian Desa Kelet dan jika ditempuh dari pati akan melewati wedarijaksa, tayu, cluwak kemudian Desa Kelet.

Desa Kelet terdapat 5 RW dan 43 RT serta memiliki 2 dukuh diantaranya :

- a. Dukuh Karanganyar
- b. Dukuh Kauman

Gambar 3.1 : Peta Wilayah Desa Kelet



(Sumber : Google Maps)

2. Kondisi Demografis

Desa Kelet memiliki jumlah penduduk 10.254 masyarakat yang terbagi dalam laki-laki sebesar 5.080 masyarakat dan perempuan 5.174 masyarakat. Jika dilihat dari perbandingan antara perempuan dan laki-laki maka perbandingan perempuan lebih banyak. Berikut daftar penduduk menurut jenis kelamin dan usia :

Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin dan Usia

No	Jenis Penduduk	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	5.080
2	Perempuan	5.174

-	Total Laki-laki dan Perempuan	10.254
1	Usia 0-17 tahun	2.413
2	Usia 18-56 tahun	6.063
3	Usia >56	1.778

(Sumber : Kantor Kepala Desa Kelet, Tahun 2022)

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Kelet adalah pedagang dan pegawai sipil dan petani, Desa Kelet mengalami perubahan dari desa agraris menjadi desa perdagangan dikarenakan sawah di Desa Kelet hanya tersisa sedikit dan kebanyakan dimiliki oleh masyarakat di luar Desa Kelet dan didominasi oleh sektor perdagangan karena terdapat pasar dan swalayan.

Tingkat Pendidikan berpengaruh dalam kualitas sumberdaya manusia, Desa Kelet memiliki beragam tingkatan pendidikan dari mulai S1, SLTA, SLTP, SD dan TK. Masyarakat Desa Kelet juga memahami pentingnya pendidikan dengan menyekolahkan tinggi anak-anaknya. Sumber daya manusia yang dibangun di Desa Kelet semakin mencerminkan kualitas dari desanya.

B. Kondisi Sosial Dan Ekonomi

1. Keadaan Sosial

Keadaan sosial masyarakat Desa Kelet memiliki hubungan dan kerukunan antara sesama dan sebagai salah satu kesatuan dalam kehidupan sosial yang selalu terbina dengan baik. Kehidupan sosial masyarakat Desa Kelet dalam sehari-harinya selalu bersifat gotong royong dan tolong menolong antar sesama.

Dalam suatu pelaksanaan tradisi, seperti perkawinan, khitanan dan lain sebagainya selalu menggunakan cara saling tolong menolong dan memberikan

sumbangan baik berupa materi maupun non materi yang juga dilakukan dengan tanpa pamrih.

Keadaan sosial di dalam Desa Kelet terdapat dalam beberapa kondisi sosial, diantaranya adalah :

a. Keagamaan

Desa Kelet menganut beberapa agama yaitu, islam, kristen, dan katolik. Mayoritas masyarakat Desa Kelet beragama islam dibuktikan dengan mayoritas temoat ibadah ada masjid dan musholla, adapun bangunan tempat ibadah bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2: Jumlah Sarana Tempat Ibadah di Desa Kelet

No	Bangunan Ibadah	Jumlah
1	Musholla	31
2	Masjid	8
3	Gereja Kristen	1
4	Gereja Katolik	4

(Sumber : Kantor Kepala Desa Kelet, tahun 2022)

Kedewasaan dalam beragama didasarkan pada rasa saling menghormati dan saling memberi menghormati setiap perbedaan adalah Sesuai ajaran agama masing-masing dalam agama Islam Kristen maupun Katolik masing-masing agama memiliki kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara dengan terciptanya kesadaran mengenai harmonisasi dalam kehidupan beragama hal tersebut adalah keinginan dalam menjalin hubungan yang harmonis antar umat beragama yang kemudian menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masing-masing pemeluk agama dalam mencapai cita-cita bersama tanpa ada perbedaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat hal tersebutlah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan bersosial bahkan diperintahkan oleh tokoh agama dari masing-masing tokoh agama tersebut

b. Pendidikan

Pendidikan ialah sarana penting dalam memajukan sumber daya manusia karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi kualitas dari sumber daya manusia di dalam masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan di Desa Kelet beraneka ragam mulai dari kuliah SLTA SLTP SD maupun TK dan Desa Kelet memiliki beberapa gedung sekolah dalam menunjang pendidikan di desa, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3: Jumlah Gedung Sekolah di Desa Kelet

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SMA	4
2	SMP	3
3	SD	6
4	TK	7

(Sumber : Kantor Kepala Desa Kelet, Tahun 2022)

Masyarakat Desa Kelet memahami akan pentingnya pendidikan dengan menyekolahkan tinggi anak-anaknya. Sumber daya manusia yang dibangun di Desa Kelet semakin mencerminkan kualitas dari desa mandiri.

Beberapa pemuda menginginkan lanjut sekolah di luar Desa Kelet, bahkan di luar jepara guna memperoleh pengalaman serta pendidikan di luar dari daerahnya. Semangat ini di dukung oleh ekonomi yang dimiliki para orang tua yang ada di Desa Kelet. Berikut daftar pendidikan masyarakat di Desa Kelet :

Tabel 3.4: Jumlah Gedung Sekolah di Desa Kelet

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Jiwa
1	Taman Kanak-Kanak	183

2	SD / Sederajat	591
3	SMP / Sederajat	619
4	SMA / Sederajat	399
5	Akademi D1-D3	241
6	Sarjana S1	155

(Sumber : Kantor Kepala Desa, Tahun 2022)

c. Budaya

Dalam budaya Desa Kelet ada beberapa tradisi tahunan yang mewarnai budaya-budaya yang ada di Desa Kelet salah satunya adalah tradisi sedekah bumi merupakan salah satu upacara adat tahunan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa Tengah khususnya di Desa Kelet. Masyarakat Desa Kelet sangat antusias dalam menyambut sedekah bumi ini. Dalam acara ini disebut dengan tradisi manganan. Tradisi manganan diikuti oleh beberapa masyarakat desa dari berbagai kalangan dan ciri khas dari tradisi manganan adalah membawa makanan nasi serta lauk-pauk ke Punden. Punden merupakan tempat di mana masyarakat desa berkumpul untuk mengikuti serangkaian prosesi tradisional

Adapun serangkaian posisi manganan diawali dengan sambutan-sambutan dari petinggi Desa beserta tokoh masyarakat, doa bersama kemudian diikuti acara makan bersama di Punden acara ini bertujuan untuk bersyukur kepada nikmat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil bumi selama mereka tinggal di Desa Kelet. Pelaksanaan sedekah bumi ini ditandai dengan penyerahan Jembul pada petinggi Desa Kelet. Jembul adalah hasil bumi masyarakat desa yang dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk kerucut setelah penyerahan jembul pada petinggi desa masyarakat diperbolehkan mengambil isi jembul tersebut.

Gambar 3.2: Jembul Sedekah Bumi Desa Kelet



(Sumber : <https://desakelet.wordpress.com/>)

2. Keadaan Ekonomi

Desa Kelet memiliki sebuah pasar yang terkenal dengan sebutan pasar kelet. Pasar ini berdiri sejak tahun 1911 oleh pemerintah belanda guna melayani kebutuhan dan menunjang konsumsi rumah sakit umum daerah kelet. Mayoritas masyarakat Desa Kelet merupakan pedagang dan buruh tani serta karyawan di perusahaan swasta.

Gambar 3.3: Pasar Desa Kelet



(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Pasar kelet ialah pasar milik pemerintah Kabupaten Jepara yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi masyarakat dalam bidang ekonomi dan menunjang perekonomian di sekitar rumah sakit umum daerah. Pasar kelet banyak menjual makanan tradisional, buah, daging, pakaian, emas dan lain-lain dengan luas pasar kelet yaitu 8040 m² dan luas bangunan 6300 m² dan rata-rata pedagang yang berjualan di Desa Kelet adalah 1.256 pedagang dengan presentase 70% berasal dari kabupaten Jepara dan 30% lainnya berasal dari Kabupaten Pati sebagian besar merupakan pedagang sembako, buah, ikan, pakaian maupun sayur.

Desa Kelet memiliki BUMDes yang dikelola oleh perangkat Desa Kelet dan bekerja sama dengan masyarakat Desa Kelet, diantaranya adalah :

- a. Bank Sampah
- b. Pupuk Pertanian

BUMDes yang ada di Desa Kelet juga melihat peluang yang ada di desa seperti pengelolaan sampah yang belum merata dikarenakan Desa Kelet ramai dilalui orang dan perputaran ekonomi yang cepat sehingga menyebabkan banyaknya sampah yang ada baik sampah rumah tangga maupun sampah di pasar Desa Kelet.

Pupuk pertanian hanya menyediakan pupuk bagi petani yang ada di Desa Kelet, pupuk di kelola oleh desa dan kemudian diperjualbelikan dalam lingkup sawah desa, hal ini menjadi usaha dalam meningkatkan perekonomian desa dari, oleh dan untuk desa (Wawancara Mas Zidni, Bank Sampah, 10 Desember 2022)

C. Kondisi Sosial Dan Politik

1. Keadaan Politik

Desa Kelet di pimpin oleh seorang kepala desa atau sering disebut dengan petinggi bernama Abdul Aziz, ST dan dibantu oleh sekretaris desa atau sering disebut carik bernama suyanto dan beberapa staff. Berikut ini struktur kepengurusan Desa Kelet :

Struktur Kepengurusan Desa Kelet 2022

- a. Kepala desa : Abdul Aziz, ST
- b. Sekretaris : Plt Suyanto
- c. Kepala Urusan
Kaur Keuangan : Mashadi

Kaur TU & Umum : Suyanto
Kaur Perencanaan : Maruli Taufiq
Kaur Pemerintahan : Susmono
Kaur Keuangan : Imam Ghozali
Kaur Kesejahteraan : -

d. Kami tuwo

Kami tuwo 1 : Akhmad Kamim
Kami tuwo 2 : Suyetno
Kami tuwo 3 : Muhtadi
Kami tuwo 4 : Supriyanto

Desa Kelet sebelumnya memiliki tokoh perempuan dalam pemerintahan desa yang menjadi sekretaris desa atau carik, beliau adalah Ibu Purwanti sebelum akhirnya beliau pensiun karena umur lebih dari 60 tahun. Sekarang pemerintah desa belum memiliki tokoh perempuan dalam pemerintah desa.

Peran perempuan dalam pemerintahan Desa Kelet setelah pensiun nya Ibu Purwanti adalah dari BPD yang memiliki satu perwakilan perempuan dalam kepengurusan BPD beliau adalah Ibu Nurhayati sebagai anggota badan permusyawaratan desa (BPD).

Dalam sejarahnya Desa Kelet belum pernah dipimpin oleh perempuan sejak awal berdirinya Desa Kelet. ada beberapa tokoh perempuan hanya sebagai perangkat maupun aktif didalam badan permusyawaratan desa (BPD) dan organisasi lainnya, seperti PKK, FKD, Karang Taruna dll.

Berikut daftar petinggi Desa Kelet dari masa ke masa :

- a. Mbah Susoh
- b. Mbah Rowo
- c. Mbah Ali
- d. Mbah Suwadi

- e. Mbah Karnadi
- f. Bapak Masrukhan
- g. Bapak Abdul Aziz
- h. Bapak Zaenal Wafa
- i. Bapak Abdul Aziz

Kekuasaan yang ada di Desa Kelet memang masih didominasi elit desa laki-laki sebagai pemimpin di dalam eksekutif maupun legislatif di tingkat desa. Relasi kuasa antara Kepala Desa, BPD, dan Tokoh Agama menunjukkan hubungan mitra yang sesuai dengan undang-undang desa dari segi kerjasama pembangunan.

Hanya saja relasi kuasa ini perempuan memang masih belum bisa ikut berkontestasi dalam politik desa yang seharusnya dengan majunya suatu desa akan membuka pikiran masyarakat akan keadilan gender yang menempatkan posisi perempuan dalam puncak politik desa, sebagai kepala desa maupun ketua badan permusyawaratan desa (BPD).

Desa Kelet dengan status desa mandiri menempatkan hubungan perempuan dan laki-laki dengan sejajar, tapi kekuasaan masih di dominasi oleh elit laki-laki walaupun dalam musyawarah ada keterlibatan perempuan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan desa. Ini sebagai langkah awal dalam menciptakan tokoh perempuan dalam kontestasi politik pemerintahan desa yang belum banyak tokoh perempuan desa memimpin desa.

Desa Kelet memiliki iklim politik yang kondusif dengan memperlihatkan profesionalisme bekerja di setiap lembaga-lembaga dibawah pemerintahan desa, keaktifan dan kontribusi lembaga-lembaga tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai bagusnya pemerintahan di dalam masyarakat. Menjadi satu kesatuan bahwa pemerintah, lembaga, dan masyarakat menjadi pilar utama dalam pembangunan desa.

BAB IV

PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA KELET

A. Aspirasi Perempuan Di Desa Kelet

Pembangunan menempatkan perempuan di daftar strategis dimana perempuan memiliki andil dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, suara-suara perempuan dan aspirasi perempuan perlu didengarkan karena pembangunan bukan hanya milik laki-laki tapi juga perempuan. Dalam pelbagai dinamika yang terjadi di masyarakat perempuan setidaknya memiliki suara yang perlu di perjuangkan, aspirasi-aspirasi perempuan dalam pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam membangun sebuah masyarakat desa.

Beberapa kajian dalam literatur pembangunan melihat beberapa aspirasi perempuan yang menyuarakan dengan lantang aspirasi-aspirasinya di muka umum. Perencanaan pembangunan dimulai dalam ruang formal seperti di musyawarah desa dan di musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perempuan menjadi subjek pembangunan ialah sebuah keharusan dikarenakan pembangunan mengatur kebutuhan dalam meningkatkan Hidup baik perempuan maupun laki-laki perempuan juga menjadi aktor kunci dalam pembangunan maka partisipasi maupun keterlibatan aktif perempuan seharusnya diberikan ruang dan kesempatan yang nyata baik itu secara kuantitas maupun kualitas yang terpresentasikan serta teraplikasikan dalam ruang-ruang formal desa maupun ruang informal desa untuk dapat dipahami dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga perempuan memiliki peluang sebagai subjek aktif dalam pembangunan tidak hanya sebagai penikmat dari hasil pembangunan desa.

Aspirasi perempuan dalam Desa Kelet mendukung program-program kesehatan seperti dalam forum kesehatan desa dan posyandu yang aktif dalam

mewarnai pembangunan yang ada di Desa Kelet beberapa kegiatan mengenai kesehatan misalnya donor darah, imunisasi dan cek kesehatan adalah bentuk dari kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh kebanyakan perempuan karena perempuan melihat kesehatan adalah yang utama bagi keberlangsungan pembangunan yang ada di desa seperti halnya imunisasi adalah awal dari kekebalan tubuh seorang manusia.

Selain kesehatan, aspirasi-aspirasi dari perempuan memandang kemandirian ekonomi serta pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh PKK dan diselenggarakan dalam forum-forum kegiatan baik berupa workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk mengelola ekonomi secara mandiri karena di daerah Desa Kelet merupakan tempat yang strategis dalam bidang ekonomi sehingga perlu adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi.

Aspirasi perempuan di Desa Kelet memang perlu didorong dengan memfasilitasi perempuan-perempuan desa dalam hal penyampaian aspirasi seperti yang diungkapkan Bapak Petinggi Abdul Aziz :

“Kalau aspirasi perempuan di Desa Kelet memang masih belum aktif dalam hal aspirasi misalkan di musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan partisipasi perempuan itu hanya sebatas perwakilan tidak menyeluruh mengenai aspirasi-aspirasi yang diungkapkan atau disampaikan di dalam forum biasanya hanya sekedar menyetujui apa yang sudah disepakati” (Wawancara Abdul Aziz, Petinggi, 28 November 2022).

Lebih lanjut kepala desa berpendapat bahwasanya perempuan-perempuan yang ada di desa ini memiliki aspirasi-aspirasi seperti contohnya adalah mengenai kemandirian ekonomi serta pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Kelet perempuan berharap bisa mandiri dalam mengelola ekonomi di masing-masing wilayah dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa dalam hal ini memang aspirasi-aspirasi perempuan berkaitan dengan masalah

ekonomi hal ini disebabkan karena wilayah Desa Kelet memang memiliki keramaian atau tempat yang strategis dalam menunjang ekonomi seperti adanya pasar dan dekat jalan utama. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Krisnawati :

“Karena mayoritas masyarakat Desa Kelet itu mata pencaharian pedagang, dan perempuan menjadi ibu rumah tangga jadi otomatis aspirasi perempuan itu berusaha untuk berperan dalam membantu pendapatan keluarga. Karena perempuan Desa Kelet jarang ada yang menganggur, ada pekerjaan sampingan, entah itu jahit, jualan” (Wawancara Ibu Krisnawati, PKK, 5 Desember 2022).

Terlebih juga pada bidang kesehatan, perempuan menjadi motor penggerak bagi kesehatan yang ada di desa sehingga perlu di dorong dari berbagai sektor dalam menggerakkan kesehatan di desa apalagi di Desa Kelet juga dekat dengan rumah sakit umum daerah dan juga mempunyai puskesmas sehingga bidang kesehatan perlu di gerakkan dalam menunjang pembangunan yang ada di desa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ita PKK:

“Aspirasi perempuan biasanya berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan kesehatan perempuan biasanya mengaspresiasi pembangunan ekonomi seperti swadaya masyarakat atau pengembangan perekonomian dalam masyarakat tapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan perempuan masih belum bisa mandiri dalam mengelolanya” (Wawancara Ibu Ita, PKK, 28 November 2022).

Dalam bidang kesehatan perempuan memiliki banyak aspirasi dari PKK maupun FKD yang memiliki wilayah dalam pengembangan aspirasi-aspirasi yang dimiliki perempuan Desa Kelet, kesehatan sebagai yang utama dalam mengembangkan kesehatan masyarakat desa seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhtadi sebagai ketua Forum Kesehatan Desa (FKD) :

“Mayoritas pengurus FKD adalah perempuan dan yang jalan ya perempuan gerak cepat ya perempuan, anggota FKD ada 35 orang, kaitannya dengan kader paru, kader diare, kader

ODGJ (orang dalam gangguan jiwa), itu semua ada kadernya” (Wawancara Bapak Muhtadi, FKD, 5 Desember 2022).

Fenomena perempuan desa dalam memberikan aspirasi aspirasi sudah diakomodir dalam ruang-ruang formal seperti di dalam musyawarah desa maupun di musyawarah perencanaan pembangunan desa akan tetapi aspirasi-aspirasi yang diakomodir oleh perempuan masih belum disuarakan di dalam forum-forum formal tersebut tetapi aspirasi-aspirasi perempuan diyakini ada dan diusahakan dengan mengimplementasikan dalam ruang-ruang sosial kemasyarakatan terbukti dari hadirnya perempuan di dalam ruang-ruang formal mewakili PKK walau masih belum maksimal dalam pengaplikasiannya setidaknya dalam kajian ini perempuan memiliki aspirasi-aspirasi dan pemerintah juga sudah memfasilitasi lewat ruang-ruang formal tersebut hanya saja dalam ruang formal masih belum maksimal.

Pola partisipasi yang dilakukan oleh PKK sebagai representasi perempuan di desa tersebut memanglah sudah ada namun wujud pembangunan hasil dari aspirasi perempuan belum bisa diimplementasikan oleh pemerintah desa aspirasi yang disampaikan oleh perempuan masih kalah dengan dominasi aspirasi pembangunan yang disampaikan oleh pihak desa hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak BPD Joko :

“Dalam partisipasi perempuan aspirasi yang dibawa oleh perempuan masih belum terlaksana dalam rapat-rapat dan beberapa dari perwakilan perempuan hanya menyetujui hasil-hasil rapat yang dilaksanakan, walau ada aspirasi yang dibawa dalam forum-forum musyawarah” (Wawancara Bapak Joko, BPD, 28 November 2022).

Perempuan memang sudah berpartisipasi di dalam rapat-rapat atau musyawarah di dalam desa bentuk partisipasinya hanya sebatas partisipasi formal dalam pelaksanaannya perempuan belum berpartisipasi di dalam substansi aspirasi-aspirasi perempuan hal ini berkaitan dengan peran perempuan dalam pembangunan desa.

Tabel 4 1: Aspirasi Perempuan PKK Desa Kelet

No	Aspirasi Perempuan	Program-Program
1	Bidang Ekonomi	Pemanfaatan Tanah Pekarangan Budidaya Warung Hidup dan Hidroponik Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
2	Bidang Kesehatan	Gerakan rumah sehat Pengelolaan limbah keluarga Pertemuan Ibu Hamil Pondok Gizi Stunting

(Sumber : RAB PKK Desa Kelet)

B. Kiprah Perempuan Di Bidang Sosial Dan Pemerintahan Di Desa Kelet

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkumpulan adalah aktivitas utama dalam menciptakan hubungan antar berbagai elemen masyarakat melalui berbagai forum pertemuan tersebut perempuan memperkuat keberadaannya baik secara individu maupun lembaga dengan adanya forum pertemuan perempuan secara berkala di tingkat dusun hingga tingkat desa kemungkinan menciptakan lembaga secara aktif dan termotivasi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang demikian bisa dilihat dalam aktivitas kadar perempuan dalam membangun kegiatan di dalam lembaga dari level dusun sampai level desa sebagaimana penyelenggaraan kegiatan-kegiatan desa dan ekonomi kemasyarakatan.

Adapun sumber daya yang ada di dalam sosial kemasyarakatan ialah bahwa telah ada lembaga sosial seperti PKK dan FKD dan perkumpulan RT RW sebagai kelompok pertemuan perempuan kekuatan organisasi seperti PKK dan FKD ini bisa menjadi sarana sebagai peran perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa yang di dalamnya ada program-program

pembangunan yang mengarah kepada kemaslahatan dan aspirasi-aspirasi perempuan yang sudah direncanakan dan diajukan kepada musyawarah desa.

Oleh karena itu di dalam bidang sosial peran serta partisipasi perempuan di dalam pembangunan masyarakat Desa Kelet bisa dibilang baik namun yang perlu diperhatikan di dalam peran dan partisipasi masyarakat adalah aktivitas organisasi sosial agar supaya dapat mengembangkan kuantitas maupun kualitas dari perempuan dalam pengembangan wawasan maupun pengembangan kreativitas bahkan pengembangan pengetahuan serta peran dalam membantu Desa dalam mewujudkan pembangunan desa menuju pada pembangunan yang lebih baik. Seperti yang di ungkapkan PKK Ibu Krisnawati :

“PKK Desa Kelet sering mengadakan perkumpulan-perkumpulan yang membahas seperti penyelenggaraan kesehatan dan usaha-usaha ekonomi. PKK Desa Kelet terbilang aktif dalam pengadaan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi perempuan maupun bagi masyarakat” (Wawancara Ibu Krisnawati, PKK, 5 Desember 2022).

Untuk kiprah di bidang sosial sendiri terkadang salah satunya ibu Krisnawati itu merupakan aktivis masyarakat dia sangat aktif terhadap isu-isu yang ada di lingkungannya. Dia memiliki pandangan bahwa adanya perempuan di dalam pemerintahan itu yang mewakili apa yang diinginkan oleh perempuan dan apa yang menjadi kebutuhan perempuan dan suara-suara itu harus disampaikan dalam musrenbangdes karena itu juga menjadi kepentingan publik jangan sampai keputusan-keputusan selalu didominasi oleh laki-laki. PKK sering mengadakan imunitas penimbangan dan sebagainya yang berkaitan dengan masyarakat kecil ibu hamil hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan anak.

Bidang pemerintahan representasi perempuan di tubuh perangkat desa lebih di dominasi laki-laki, pimpinan-pimpinan dan juga para pemangku kebijakan strategis seperti kades masih dipegang oleh laki-laki walaupun

jumlah perempuan lebih banyak dalam masyarakat desa tetapi belum bisa merepresentasikan kepentingan perempuan karena program-program perempuan pemberdayaan perempuan masih kalah dengan program-program prioritas yang ada di desa dan juga pembangunan infrastruktur karena masyarakat juga masih sangat lebih condong menyampaikan perihal masalah pembangunan infrastruktur di lingkungannya masing-masing daripada pemberdayaan perempuan.

Segi pemerintahan desa kuota dari perempuan tidak merepresentasikan keadilan gender dalam bidang politik dikarenakan presentase dari perangkat desa maupun badan permusyawaratan desa (BPD) diisi oleh laki-laki dan aktor atau aktivis perempuan hanya bisa berpartisipasi di luar daripada pemerintahan desa dalam hal ini aktif di dalam PKK maupun FKD dan di dalam forum-forum musyawarah.

“di Pemerintah Desa semuanya laki-laki, dulu pernah ada perempuan, namanya bu Purwanti, tapi sudah pensiun, umurnya sudah 65 tahun, ada pemilihan sekretaris desa nanti habis lebaran, perempuan-perempuan beberapa yang aktif di dalam lembaga seperti di FKD, PKK, KPMD” (Wawancara Bapak Muhtadi, FKD, 5 Desember 2022).

Pemerintah Desa Kelet semuanya di jabat oleh laki-laki dan tidak ada keterwakilan perempuan yang ada di dalam pemerintah desa, beberapa tahun kebelakang ada perwakilan perempuan dalam pemerintah desa sebagai sekretaris desa / carik yang dijabat oleh ibu Purwanti dikarenakan masa yang sudah pensiun akhirnya jabatan beliau di gantikan oleh plt Suyanto.

Posisi-posisi strategis desa di isi oleh laki-laki dalam pelaksanaannya, perempuan hanya aktif di dalam lembaga-lembaga PKK yang diketuai langsung oleh istri bapak petinggi, yaitu Ibu Rina, dan FKD diketuai oleh bapak Muhtadi dan sebagian besar anggotanya adalah perempuan, dalam BPD hanya ada satu

perwakilan perempuan yaitu Ibu Nurhayati, dan ada KPMD (Kader Pembangunan Desa) yang diketuai oleh Ibu Yulia Krisnawati.

C. Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa

1. Partisipasi dan peran perempuan di ruang formal

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam ruang atau partisipasi pembangunan desa mencakup beberapa jenis dalam bidang yang sangat luas terutama di Desa Kelet memiliki ruang yang diperuntukkan bagi masyarakat terkhusus perempuan dalam ruang berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan adanya partisipasi perempuan akan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah berbasis keadilan gender karena ruang partisipasi publik yang terdapat di Desa Kelet dalam ruang formal seperti di dalam musyawarah desa dan musyawarah pembangunan desa serta dalam ruang-ruang penyampaian aspirasi perempuan desa.

Ruang-ruang formal sebagai penyampaian aspirasi perempuan desa menjadi satu indikator dalam menilai sejauh mana perempuan dalam berpartisipasi dan berperan di dalam politik terkhusus dalam proses pembangunan desa yang dalam hal ini dikaitkan dengan *sustainable development goals* (SDGs) dalam segi keadilan gender.

a. Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah desa atau musdes ialah satu dari forum yang dibuat oleh pemerintah desa bekerja sama dengan badan permusyawaratan desa (BPD) guna menciptakan ruang demokrasi di dalam masyarakat dalam berpartisipasi di dalam pembangunan terkhusus kaum perempuan dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang dibahas di dalamnya termasuk laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan desa pembahasan menyepakati dan menetapkan RPJMDes atau rencana kerja pemerintah menengah desa dan pembahasan dan pengesahan RKPDes atau rencana kerja pemerintah desa dan daftar usulan RKPDes hal ini menjadi dokumen formal dalam acuan pembangunan Desa Kelet atas usulan dari masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Keterlibatan perempuan atau partisipasi perempuan di dalam forum musyawarah desa ini hadir berkontribusi dalam memberikan pendapat dan ikut dalam merencanakan serta memutuskan program-program yang akan dibahas di dalam forum selanjutnya forum formal yaitu musrenbang Des berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Kelet selaku penyelenggara musdes menyampaikan bahwa :

“Dalam forum musyawarah desa keterlibatan perempuan sudah ada dan diwakilkan oleh PKK mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, POKJA 1,2,3,4 dari anggota perempuan BPD dan FKD ikut merencanakan serta memutuskan program kerja di dalam musyawarah desa walaupun hanya beberapa saja yang hadir tapi itu sudah mempresentasikan keterwakilan perempuan di desa” (Wawancara Bapak Joko, BPD, 28 November 2022).

Penyelenggaraan musyawarah desa di Desa Kelet keterwakilan perempuan baik dari unsur PKK, BPD, FKD sudah terwakilkan kemudian mengetahui sejauh mana keterlibatan perempuan dalam forum formal musyawarah desa harus diketahui langsung dari sumber partisipan perempuan yang dalam hal ini adalah PKK terkait dengan peran dan partisipasinya di dalam ruang formal musyawarah Desa Kelet:

“Keterlibatan saya dan teman-teman PKK dalam forum ya aktif kita juga di undang mulai dari ketua, sekretaris, bendahara Pokja 1 Pokja 2 Pokja 3 Pokja 4 itu semuanya hadir dan memberikan ide-ide atau gagasan yang ada di dalam rapat PKK yang sudah ada sebelumnya jadi keterlibatan perempuan

dalam musyawarah desa ini bisa dikatakan cukup” (Wawancara Ibu Sulastri, PKK, 5 Desember 2022).

Penyelenggaraan musyawarah desa keterlibatan perempuan cukup aktif dalam forum karena sudah ada perwakilan perempuan di dalam musyawarah desa. Sehingga dalam presentase keterwakilan di dalam musyawarah desa perempuan telah turut andil dalam mengambil bagian serta berpartisipasi di dalam ruang formal atau musyawarah desa sebagai bagian dari pembangunan desa walaupun hanya sebatas partisipasi hadir.

b. Musyawarahan perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes)

Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbangdes adalah forum perencanaan atau program yang dilakukan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan yang lain yang dalam hal ini dilakukan oleh badan permusyawaratan desa atau BPD. Musrenbangdes biasanya diadakan akhir tahun guna menyusun atau rencana kerja pembangunan desa yang selalu diikuti dengan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes dokumen ini tidak terpisahkan dalam musyawarah yang mufakat RKPDes dan APBDes merupakan acuan dalam pemerintah desa sebagai pelaksanaan pembangunan di dalam desa kemudian keterbukaan dalam penyampaian Informasi Publik kepada masyarakat menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa dalam melakukan transparansi anggaran.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa di mana materi pembahasan yang pertama dilakukan dengan mengundang seluruh aparatur desa dan mengajukan ide gagasan di setiap dusun kemudian dibuat skala prioritas dalam menyusun dokumen-dokumen formal di setiap tahun dan disetujui di dalam forum musrenbangdes kemudian melibatkan masyarakat umum khususnya perempuan melalui lembaga-lembaga desa di dalam forum resmi yang dijadikan ruang musyawarah mufakat masyarakat dengan pembahasan

dilakukan sebagai rumusan perencanaan pembangunan desa dan usulan perencanaan pembangunan pada level di atasnya musyawarah perencanaan pembangunan desa didominasi oleh elit laki-laki desa dalam pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Petinggi Abdul Aziz :

“Kalau dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ada beberapa perwakilan dari RT RW maupun dari organisasi-organisasi itu keterwakilan perempuan juga ada dan diundang semua walaupun dalam pelaksanaannya hanya beberapa saja yang memberikan usulan dan yang lainnya mengiyakan usulan perencanaan pembangunan” (Wawancara Bapak Abdul Aziz, Petinggi, 28 November 2022).

Ada beberapa perwakilan perempuan peserta dalam musrenbangdes perempuan-perempuan ini terlibat dalam musrenbangdes perwakilan dari ibu-ibu PKK dan dalam pengambilan keputusan juga masih belum aktif dalam memberikan keputusan-keputusan. peran perempuan dalam pengambilan keputusan dirasa perlu ditingkatkan kembali karena perwakilan hanya sebatas pada formalitas belaka tanpa adanya substansi yang menjadikan aspirasi-aspirasi perempuan didengar dan dilaksanakan. Hal ini senada yang dituturkan oleh PKK Ibu Sulastri :

“Perempuan dalam musrenbangdes aktif dalam berpartisipasi, tapi kadang jarang dalam berbicara tapi dalam perencanaan yang menyangkut hal-hal penting seperti anggaran saya masih aktif dalam memberikan komentar” (Wawancara Ibu Sulastri, PKK, 5 Desember 2022).

Partisipasi perempuan dalam musrenbangdes perempuan memiliki kuota yang sama dalam forum-forum musrenbangdes hanya saja di dalam forum perempuan masih belum aktif dalam penyampaian ide-ide maupun gagasan yang telah di aspirasikan melalui organisasi atau lembaga-lembaga yang menaungi perempuan. Seperti yang disampaikan oleh BPD Desa Kelet,

“Dalam proses perencanaan penggalan informasi diadakan di setiap dusun dalam mengirimkan perwakilannya yaitu kepala dusun beserta kepala RT dengan melihat apa saja keperluan yang diperlukan untuk pembangunan desa di dalam dusun masing-masing biasanya masyarakat belum begitu aktif di dalam forum formal namun jika di dalam forum informal aspirasi-aspirasi masyarakat disuarakan “ (Wawancara Bapak Joko, BPD, 28 November 2022).

Pemerintah Desa Kelet memberikan ruang masyarakat dalam berpartisipasi di dalam proses perencanaan pembangunan desa namun di dalam ruang formal tersebut partisipasi perempuan diwakili di dalam PKK Selain itu belum ada perwakilan perempuan di dalam ketua Dusun maupun ketua RT karena semuanya laki-laki. Sejalan apa yang disampaikan bu Ita PKK :

“Untuk rapat pembangunan desa beberapa kali ikut, dan partisipasi perempuan juga ada, biasanya juga di luar rapat ditanyai apa keperluan perempuan lewat PKK“ (Wawancara Ibu Ita, PKK, 28 November 2022).

Dapat disimpulkan bahwa perempuan di Desa Kelet ikut turut berpartisipasi dalam forum formal dan pemerintah desa memiliki strategi lain dalam mendongkrak partisipasi perempuan melalui ruang informal yang ditanyai apa aspirasi perempuan dalam pembangunan, seperti yang disampaikan petinggi Desa Kelet Abdul Aziz :

“Perempuan melalui PKK Desa Kelet ini beberapa ada yang hadir dari perwakilan, selain itu ada yang ditanyai dalam PKK kebutuhannya apa“ (Wawancara Bapak Abdul Aziz, Petinggi, 28 November 2022).

Perempuan Desa Kelet aktif dalam partisipasi perencanaan pembangunan dan ditambah dengan pemerintah desa terjun langsung menanyai kebutuhan PKK. Ada relasi antara lembaga-lembaga PKK karena Bapak Petinggi dan Ketua PKK memiliki hubungan rumah tangga, sehingga relasi yang dibangun antar lembaga semakin kuat.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan di dalam masyarakat desa bisa diartikan sebagai proses masyarakat desa dalam memilih rencana atau ide dalam mengaplikasikan dengan metode yang efisien sesuai dengan partisipasi perempuan aktif sebagai subjek melalui ruang formal melalui perencanaan kemudian proses jalannya program sampai proses evaluasi permasalahan pemberdayaan perempuan dan persamaan hak dalam berpartisipasi maupun berkontribusi adalah hak asasi manusia yang dijamin tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek baik dari politik ekonomi maupun sosial walaupun realisasi dari itu semua tergantung pada bagaimana hubungan partisipasi perempuan maupun laki-laki dalam pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan di musenbangdes itu melalui jejak pendapat, sebelum para unsur-unsur desa mulai dari RT, RW kemudian anggota BPD serta tokoh masyarakat ikut dalam rapat-rapat mereka menyerap aspirasi terlebih dahulu di warganya masing-masing yang selanjutnya aspirasi tersebut itu disampaikan di forum kebanyakan ternyata forum itu hanya menyampaikan aspirasi berkaitan dengan masalah pembangunan infrastruktur sedangkan dana desa dan juga ADD tidak bisa dialokasikan untuk hanya pembangunan infrastruktur saja tapi dibagikan ataupun di alokasikan untuk hal-hal yang lain seperti pemberdayaan masyarakat dalam menyiasati masalah hal itu maka proses penjaringan aspirasi itu berdasarkan skala prioritas dimana wilayah yang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur itu maka dia yang akan didahulukan, untuk wilayah lainnya itulah yang tidak kebagian nanti akan menyusul di tahun anggaran berikutnya, melihat dari aspirasi yang disampaikan masyarakat ataupun unsur dari keterlambatan tersebut jarang menginspirasi berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan semua masih berfokus kepada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sarana prasarana di masyarakatnya itu. Andil perempuan di situ balik lagi hanya mereka yang

menjadi anggota BPD perempuan dan juga ketua RT maupun ketua RW yang perempuan itu yang mereka terlibat dalam hal jadi pengambilan keputusan tersebut tetapi balik lagi mereka tidak menyuarakan aspirasi berkaitan dengan masalah perempuan tidak banyak menyampaikan hal tersebut.

Dalam pengambilan keputusan pihak perempuan sedikit dalam menyuarakan beberapa pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan yang menjadi aspirasi mereka dan dalam pengambilan keputusan semuanya masih didominasi oleh laki-laki yang menjadi pemangku kebijakan di ruang-ruang formal. Seperti yang disampaikan bu ita PKK

“Dalam kenyataannya perempuan dalam berbicara masih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, karena jumlah perempuan yang ada masih sedikit” (Wawancara Ibu Ita, PKK, 28 November 2022).

Proses pengambilan keputusan tetap di diputuskan oleh suara mayoritas di sini adalah laki-laki sebagai partisipan dari musyawarah-musyawarah atau rapat-rapat yang ada di dalam ruang formal.

2. Partisipasi dan peran perempuan di ruang informal

a. PKK

PKK atau pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga merupakan gerakan pembangunan di dalam masyarakat yang menjadi motor penggerak di dalam membangun keluarga sebagai satuan terkecil di dalam pembangunan desa dan diharapkan dapat menggerakkan dan membina keluarga dengan tujuan keluarga sejahtera biasanya forum PKK aktif di setiap desa melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan sebulan sekali dengan tempat dipilih setiap dusun hal ini guna mempererat silaturahmi dan menyatukan aspirasi-aspirasi perempuan dalam kegiatan yang biasa diselenggarakan oleh PKK.

Dalam forum PKK yang hal ini dipelopori oleh ketua PKK terdapat dua jenis Rapat bulanan dan rapat kondisional Rapat bulanan biasanya dilakukan setiap tanggal satu di setiap bulannya berbarengan dengan kegiatan rutin PKK ruang-ruang informal seperti rapat PKK diadakan berdasarkan kebutuhan yang menjadi kebutuhan dari perempuan desa dan kegiatan rutin PKK secara kondisional diadakan dengan sifat tidak diagendakan. Seperti yang disampaikan Ibu Krinawati :

“PKK biasanya ada dua agenda rutin yang kegiatan rutin yang kedua kegiatan kondisional biasanya ibu-ibu satu bulan kumpulnya satu kali dan ditempatkan di dalam dusun dusun sebagaimana penyerapan aspirasi perempuan di masing-masing dusun agar tetap berjalan “ (Wawancara Ibu Krisnawati, PKK, 5 Desember 2022).

Rapat perencanaan pembangunan desa terdapat dua jenis rapat bulanan yang diadakan oleh PKK yang dimobilisasi oleh pengelola PKK berdasarkan penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa partisipasi di dalam PKK bisa menyentuh di dalam dusun-dusun sebagai tuan rumah di dalam ruang-ruang informal yang dilakukan oleh PKK ruang partisipasi perempuan di Desa Kelet adalah rapat-rapat informal yang dilakukan oleh PKK dan PKK setiap bulannya mengadakan kegiatan-kegiatan berbarengan dengan Rapat bulanan maupun rapat kondisional yang dilakukan rutin oleh PKK yang digelar setiap dusun ke dusun.

b. Lobbying

Proses lobbying di dalam desa sering dilakukan anggota BPD sebagai bentuk partisipasi dalam menyampaikan aspirasi, biasanya anggota BPD melobi dan juga mengobrol dengan petinggi melobi sekdes berkaitan dengan masalah program terkadang insidental kadang disetujui dan kadang tidak disetujui tergantung ada anggaran atau tidak seperti yang disampaikan Ketua BPD Joko :

“Proses lobi sendiri terkadang dari pihak BPD itu meminta kegiatan ataupun ada satu alokasi pendanaan untuk kegiatan yang diinginkan oleh masyarakat dan terkadang ada beberapa yang disetujui dan disepakati tetapi kadang juga ada yang tidak disepakati karena keterbatasan anggaran.” (Wawancara Bapak Joko, BPD, 28 November 2022).

Proses lobi juga dilakukan oleh PKK sebagai perwakilan perempuan di desa beberapa hal yang disampaikan dari PKK lebih kepada keinginan-keinginan dari perempuan untuk melakukan sebuah kegiatan di dalam masyarakat khususnya untuk perempuan. Sama halnya proses lobi yang dilakukan oleh BPD, PKK juga kadang kegiatan-kegiatan bisa disepakati atau tidak disepakati karena hanya keterbatasan anggaran.

Proses lobbying adalah proses partisipasi yang dilakukan oleh perempuan melalui organisasi PKK dan juga menjadi sarana komunikasi dalam mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam pemerintah terutama mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PKK sehingga proses lobi juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. PKK dalam hal melobi juga berpartisipasi secara tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Ketua PKK Ibu Rina sebagai aktor dalam melobi bapak petinggi karena relasi keluarga yang memudahkan proses-proses lobi ini dilakukan, tapi memang dalam kenyataannya tidak semua lobi terpenuhi, hanya yang penting-penting yang bisa di sepakati oleh PKK dan Pemerintah desa.

Relasi politik dan gender di dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam proses lobbying perlu adanya kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Aziz dan Ibu Rina dalam melakukan proses lobbying dan mempengaruhi pemangku kepentingan dalam memberikan kebijakan atau keputusan politik tentang apa yang diinginkan oleh lembaga-lembaga dalam memberikan program-program perempuan dalam kaitannya

dengan sinergitas antara pemerintah desa dengan PKK sejatinya perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam politik mewujudkan peran dan kontribusi perempuan dalam mewarnai pembangunan yang ada di desa karena ini menyangkut kapasitas laki-laki maupun perempuan dalam sama-sama berkontribusi di dalam pembangunan desa.

BAB V

PROGRAM-PROGRAM PRO PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

A. Program-Program Pembangunan Pro Perempuan

Program-program Pro perempuan dalam desa sebagaimana tertuang dalam sustainable development goals atau pembangunan berkelanjutan menjadi role model pembangunan desa seperti yang dicontohkan dalam kementerian desa yaitu program desa ramah perempuan dan peduli anak setidaknya untuk posisi perempuan dalam ruang publik dan penentu arah pembangunan masyarakat menciptakan program-program yang mendukung perempuan dalam segi kualitas maupun kuantitas perempuan. Seperti yang disampaikan PKK Krisnawati :

“Program-program dilakukan di luar pemerintahan seperti pengajian muslimat fatayat dan juga pemberdayaan ketika masak-masak bersama oleh anggota PKK kemudian hasil dari masakan itu dijual jadi kegiatan perempuannya itu aktif lebih banyak di luar pemerintahan sedangkan dari pemerintahan sendiri untuk mengkoordinatori kegiatan yang berkaitan dengan keperluan itu jarang contoh pemerintah desa itu saya melihat pemberdayaan perempuan itu tidak terlihat” (Wawancara Ibu Krisnawati, PKK, 5 Desember 2022).

Peran perempuan dalam pembangunan Desa Kelet kini beberapa sedikit terlihat walaupun di dalam pemerintah memang belum berpartisipasi banyak tapi kalau di dalam sosial kemasyarakatan perempuan ikut terlibat dalam proses pembangunan desa di Desa Kelet juga ada FKD atau forum kesehatan desa yang dibentuk untuk memfasilitasi perempuan dalam melayani kesehatan. Pemerintah Desa saat ini sudah memperhatikan kaum perempuan terlihat jelas dari beberapa kelompok FKD yang telah berkembang dalam melakukan

kegiatan-kegiatan lebih banyak lagi pihak Desa menciptakan inovasi baru dalam hal kesehatan terutama kesehatan perempuan.

Forum kesehatan Desa dibentuk untuk mengembangkan kesehatan desa yang beberapa meliputi gotong royong masyarakat upaya kesehatan wadah dalam merumuskan dan memecahkan masalah kesehatan dan di dalam kegiatan forum kesehatan Desa ini banyak melibatkan masyarakat dalam bidang kesehatan seperti acara-acara atau kegiatan dari Puskesmas misalkan donor darah dan pencegahan perkembangan jentik nyamuk dan sosialisasi tentang menjaga kebersihan lingkungan maupun buang sampah pada tempatnya.

Kegiatan-kegiatan semacam ini mendukung perempuan dalam bidang kesehatan terlebih lagi Desa Kelet memiliki rumah sakit umum daerah yang dekat dengan desa dan juga memiliki Puskesmas sehingga secara tidak langsung kesehatan di Desa Kelet harus tercerminkan dengan adanya Rumah Sakit maupun Puskesmas.

Seperti yang disampaikan oleh ketua FKD Muhtadi

“dalam pertemuan-pertemuan Seminar maupun kegiatan dari FKD ini sangat mulia karena tugas-tugas yang diemban dalam melaksanakan kesehatan sepenuhnya untuk menjaga agar lingkungan tetap bersih dan kondusif dari berbagai penyakit apalagi pasca pandemi yang masif dalam penyebaran penyakit banyak perempuan yang terfasilitasi dalam kegiatan-kegiatan FKD ini menjadi gebrakan baru bagi perempuan dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa” (Wawancara Bapak Muhtadi, FKD, 5 Desember 2022).

FKD atau forum kesehatan desa merupakan wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kesehatan di dalam pembangunan desa guna merencanakan menetapkan serta monitoring evaluasi pembangunan di bidang kesehatan desa forum kesehatan terdiri dari :

1. Kepala desa dengan perangkatnya
2. Badan permusyawaratan desa
3. PKK
4. Kader, tokoh masyarakat, tokoh agama
5. Perwakilan kelompok tertentu

Adapun tugas forum kesehatan desa antara lain adalah :

1. Menyusun kebijakan
2. Mengumpulkan informasi dan menggali potensi dari masyarakat
3. Memadukan potensi dan kegiatan yang ada di desa
4. Merencanakan atau mengidentifikasi masalah dan sebab masalah dalam menyusun pemecahan masalah dalam musyawarah desa
5. Koordinasi
6. Penggerak dan pembinaan pengembangan kegiatan
7. Monitoring dan evaluasi kegiatan Desa
8. Penghubung berbagai kegiatan kepentingan

Beberapa indikator yang bisa dikatakan keberhasilan FKD antara lain adalah :

1. ada forum yang melaksanakan tugas
2. ada rencana pembangunan
3. ada kebijakan bidang kesehatan
4. ada rapat rutin
5. ada rencana kegiatan yang terlaksana
6. ada dukungan yang berkelanjutan

Adapun kegiatan gotong royong dalam masyarakat di bidang kesehatan ini dimasukkan di dalam kegiatan-kegiatan FKD sebagai gotong royong dalam pengembangan diri dari oleh dan untuk masyarakat secara mandiri sesuai potensi yang ada forum kesehatan desa ini banyak berpartisipasi di dalam pembangunan desa terkhusus kesehatan

Adapun indikator dari keberhasilan kegiatan gotong royong masyarakat adalah :

1. ada kegiatan dari oleh dan untuk masyarakat
2. ada hubungan dengan kegiatan lain
3. ada peningkatan di dalam partisipasi masyarakat

kegiatan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh forum kesehatan desa adalah untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal dan menjaga kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia dan juga untuk melaksanakan aspirasi-aspirasi perempuan yang ada di dalam pengurus forum kesehatan desa dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat.

B. Tarik-Ulur Kepentingan Perempuan Dalam Pembangunan Desa

Perempuan merupakan aset dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang begitu besar bagi kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan perempuan erat kaitannya dengan peningkatan kualitas generasi perempuan menurut bangsa Karena perempuan merupakan sekolah utama bagi anak-anak bangsa dalam sebuah keluarga.

Kepentingan-kepentingan perempuan harus menjadi yang utama dalam proses pembangunan desa karena ketidaksetaraan gender dalam pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh perempuan dalam pembangunan seperti partisipasi kerja yang rendah kualitas kesehatan yang kurang dan kualitas pendidikan yang masih rendah.

Hambatan-hambatan perempuan dalam pembangunan desa seperti tradisi sikap dan prasangka yang menolak partisipasi perempuan dalam kegiatan

ekonomi sosial dan politik dan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia terkhusus perempuan dan beban kesehatan pada saat kehamilan dan kurangnya makanan dan gizi.

1. Anggaran

Setiap desa memiliki perencanaan keuangan dalam bentuk Dana Desa ataupun Alokasi Dana Desa bahkan dari pendapatan desa itu sendiri perencanaan keuangan yang baik dan penganggaran yang baik akan menimbulkan banyak kebermanfaatan dalam pembangunan desa. Perencanaan dan penganggaran keuangan desa adalah proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan adalah penganggaran yang ditujukan kepada pembangunan desa baik dari fisik maupun non fisik.

Oleh karena itu pentingnya anggaran maka perencanaan atau penyusunan anggaran juga menjadi suatu yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa secara umum APBDES merupakan dokumen formal dari kesepakatan antara pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) mengenai belanja yang ditentukan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. di Desa Kelet sebagaimana di dalam APBDes penganggaran yang dilakukan saat ini masih memprioritaskan BLT desa dan penanganan covid-19 dan program prioritas lainnya dalam hal ini pemulihan ekonomi dan mitigasi dalam penanganan bencana diatur dananya dalam APBDes saat ini.

Jika dilihat dari data apbdes perubahan anggaran untuk perempuan dan anak bisa dikatakan sedikit hanya 2.400.000. Bisa disimpulkan bahwa perempuan dalam pembangunan di Desa Kelet masih minim anggaran walaupun dalam pemberdayaan perempuan masih aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa Kelet. Ruang-ruang pembangunan dalam pemberdayaan perempuan

diinisiasi oleh beberapa aktivis perempuan yang tergabung dalam PKK atau bahkan RW yang sering mengadakan perkumpulan-perkumpulan dan bisa dikatakan aktif dalam mewarnai setiap pembangunan yang ada di Desa Kelet. Penggunaan dana desa diprioritaskan guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Krisnawati PKK :

“Masalah anggaran di dalam PKK sendiri nilainya dalam RAB mencapai 67.000.000,- akan tetapi memang belum mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang dilaksanakan PKK kalau dibilang cukup belum cukup karena anggaran tidak bisa menutupi semua kegiatan PKK” (Wawancara Ibu Krisnawati, PKK, 5 Desember 2022)

Program-program prioritas di Desa Kelet dalam pemberdayaan masyarakat lebih kepada bidang pertanian dan peternakan sedangkan dalam pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga masih minim sehingga pembangunan dalam sektor pemberdayaan perempuan belum bisa maksimal dikarenakan anggaran yang dikeluarkan dari desa belum bisa mengakomodir pemberdayaan pemberdayaan perempuan. Seperti yang dijelaskan Bapak Muhtadi :

“Semua anggaran yang ada di desa menurun sebesar 30% yang menjadikan berkurangnya anggaran kepada lembaga-lembaga yang menjadi aktor dalam pemberdayaan pembangunan desa” (Wawancara Bapak Muhtadi, FKD, 5 Desember 2022)

Anggaran yang ada di desa sekarang mengalami pemotongan sebesar 30% yang menjadikan anggaran yang masuk di dalam lembaga-lembaga menjadi berkurang dan menyebabkan penyesuaian anggaran di setiap lembaga-lembaga.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan difokuskan kepada perempuan itu sendiri bahwasanya permasalahan kaum perempuan berekor pada rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan sendiri dalam hal ini mengakibatkan perempuan belum mampu bersaing secara kualitas maupun kuantitas dengan kaum laki-laki dalam masyarakat terkhusus dalam pembangunan. Berbagai usaha telah dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan keterampilan perempuan seperti yang dikembangkan oleh program-program PKK dan FKD yaitu dalam sektor ekonomi maupun kesehatan.

Ada dua agenda dalam pengembangan sumber daya manusia perempuan yang pertama adalah mempengaruhi kebijakan dan program desa dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung perempuan atau yang mendukung organisasi dan lembaga yang berkaitan dengan perempuan atau perspektif gender upaya-upaya penanganan masalah perempuan harus dikembangkan secara struktural dan sistematis seiring dengan perkembangan kelembagaan setiap organisasi maupun institusi. kemudian yang kedua adalah advokasi pengkajian terhadap akar masalah dari persoalan ketidakadilan gender dalam masyarakat strategi ini dipersiapkan guna memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bermasyarakat serta menjadikan budaya yang berkeadilan gender.

Dalam pengembangan sumber daya manusia perempuan usaha memperjuangkan pemberdayaan perempuan tidaklah sama dengan perjuangan kaum perempuan melawan laki-laki karena persoalan penindasan perempuan bukan datang dari laki-laki saja melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat.

Dalam lingkup pemuda proses Pengembangan sumber daya manusia melalui proses awal yaitu perekrutan kemudian pengembangan dalam hal ini pemuda mengembangkan sumber daya manusia melalui apa yang sering dilakukan oleh pemuda misalkan melalui olahraga maupun melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti sosialisasi, latihan dan lain-lain. Adapun proses pengembangan sumber daya manusia melalui penyeimbangan antara laki-laki dan perempuan karena pada hakikatnya laki-laki dan perempuan adalah setara. Seperti yang diungkapkan oleh mas Miqdad :

“Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan dari bawah, pemuda-pemuda ini di dekati dan ditanya apa yang menjadi keinginan mereka serta dalam pengembangan sumber daya manusia ini tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan” (Wawancara mas Miqdad, Pemuda, 10 Desember 2022).

Perempuan memiliki peran yang sangat strategis sebagai pendidik utama dalam keluarga dalam perjalanannya perempuan harus dididik sejak muda karena akan menjadi penentu dalam keberlangsungan kehidupan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan yang sama dalam hal belajar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek sistem kehidupan di dalam masyarakat proses-proses pembangunan dapat meliputi sosial, ekonomi, budaya maupun politik dalam kajian ini dibahas mengenai pembangunan di level desa sebagai subjek pembangunan nasional. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri, desa merupakan pemerintahan dengan level paling rendah. Dengan hadirnya kebijakan *sustainable development goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan desa yang digagas oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) menjadikan poin-poin di dalam *SDGs* diterapkan di dalam pembangunan yang ada di desa, dalam kajian ini memfokuskan pada poin kelima yaitu kesetaraan gender di mana dalam poin tersebut membahas mengenai indikator-indikator yang harus terpenuhi di dalam pembangunan desa salah satunya adalah terciptanya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa baik sebagai aparatur desa maupun di dalam badan permusyawaratan desa (BPD), perempuan mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan serta keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.

Sedangkan hasil kajian ini membahas mengenai aspirasi-aspirasi perempuan yang ada di desa kelet adalah dalam bidang kesehatan dan bidang ekonomi sebagai mana dalam tabel :

No	Aspirasi Perempuan	Program-Program
1	Bidang Ekonomi	Pemanfaatan Tanah Pekarangan Budidaya Warung Hidup dan Hidroponik Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
2	Bidang Kesehatan	Gerakan rumah sehat Pengelolaan limbah keluarga Pertemuan Ibu Hamil Pondok Gizi Stunting

Kiprah perempuan di dalam pembangunan desa perempuan di desa bidang politik hanya mewakili di dalam badan permusyawaratan desa (BPD) dan di dalam sosial banyak diwakili di dalam PKK maupun FKD yang menjadi lembaga yang ada di dalam pemerintah desa.

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan dibagi menjadi ruang formal dan ruang informal di ruang formal perempuan banyak terlibat aktif di dalam proses-proses pengambilan keputusan walaupun hanya sebagai perwakilan dengan jumlah sedikit di dalam musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan oleh desa, sedangkan di dalam ruang informal perempuan berperan di dalam pembangunan yang dilakukan oleh PKK maupun FKD dalam hal ini turut ikut andil di dalam proses-proses pembangunan dan ikut dalam proses lobyng yang dilakukan oleh PKK melalui ketua PKK yang dalam hal ini diketuai oleh Ibu Rina sebagai istri dari Bapak Petinggi Abdul Aziz.

Dampak dari peran perempuan ini yaitu menciptakan program-program pro perempuan di dalam tubuh PKK yang setiap bulan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang kesehatan maupun ekonomi sedangkan terdapat tarik ulur kepentingan perempuan dalam pembangunan desa yang pertama adalah mengenai anggaran yang dianggarkan di dalam tubuh PKK sekitar 67.000.000

yang dirasa kurang oleh perempuan-perempuan desa di dalam mewujudkan program-program yang mendukung perempuan dan anggaran yang ada di desa saat ini mengalami penurunan sekitar 30% karena adanya pemotongan anggaran selanjutnya mengenai pengembangan sumber daya manusia merupakan strategi dalam meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yang berfokus pada perempuan itu sendiri dan ada dua agenda pengembangan sumber daya manusia baik mempengaruhi kebijakan dan program desa dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan atau mendukung organisasi dan lembaga yang berkaitan dengan perempuan dalam upaya-upaya penanganan masalah perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mencoba membuat saran-saran mungkin bisa dilakukan oleh berbagai pihak terkhusus para sarjana maupun pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap penelitian tentang perempuan dan pembangunan desa adapun saran-saran yang dibuat penulis adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya pemerintah baik pemerintah desa maupun BPD dalam mengedukasi masyarakat bahwa pada dasarnya laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama di dalam politik maupun sosial salah satunya di dalam pembangunan desa .
2. Perlu adanya peningkatan pemahaman bahwa kesetaraan antara perempuan maupun laki-laki dalam bidang pemerintahan desa maupun dalam pengambilan keputusan di ruang formal maupun informal.
3. Perlu adanya tempat edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan berbasis gender di dalam pembangunan desa.
4. Perlu ditingkatkan lagi mengenai anggaran yang berbasis kesetaraan gender dalam menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, L. K. (2018). Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan Dan Mencapai SGDs. *Jurnal Kesetaraan dan keadilan gender*.
- Bhasin, K. (2001). *Memahami Gender*. Jakarta: Teplok Press.
- BPS. (2021). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi*. Jakarta: BPS.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, D. A. (1996). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- De-Vries, D. W. (2006). *Gender bukan tabu: catatan perjalanan fasilitasi kelompok perempuan di Jambi*. Bogor: Center of International Forestry Research.
- Fakih, D. M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, L. (2015). Analisis Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.
- Hardani, S. M. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hardjanto, I. (2011). *Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Hunia Djumati, W. Y. (2015). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Huntington, J. N. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Iskandar, H. (2020). *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Josep. (2018). *Partisipasi politik di indonesia dan upaya pengembangannya*. Jakarta: Indocamp.
- Kemendes. (2020). *Peringkat status indeks desa membangun (idm) provinsi jawa tengah*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Kurniati, T. (2018). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *UIN Sumatra Utara*.
- Nugrahani, F. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta.
- Pryanka, A. (2021). *BPS : Kesenjangan Kemiskinan Kota dan Desa Masih Tinggi*. Republika.
- Puspaningrum, D. (2022). Desa Ramah Perempuan: Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa Sumberpakem Dalam Implementasi SDGS. *UMJember Proceeding Series*.
- Rahmawati. (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Rahmawati. (2020). Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*.
- Rasyidin, D. (2016). *Gender dan Politik. Keterwakilan Wanita Dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Saldi, S. (2010). *Berbeda tapi setara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Stiglitz, J. E. (2011). *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa PDB bukan tolok ukur yang tepat menilai kemajuan?* Tangerang: Marjin Kiri.

- Subakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiarto, S. (2020). Isu Pemberdayaan Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Sosial Soedirman*.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 43.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Warjio, P. (2016). *Politik Pembangunan Paradoks, Teori, Aktor dan Ideologi*. Jakarta: Kencana.
- Yunita Farah Monica, L. F. (2017). Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Candi. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian ke Desa Kelet



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2732/Un.10.6/K/KM.05.01/11/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

23 November 2022

Yth.
Kepala Desa Kelet
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Gender dan Pembangunan Desa Perspektif Sustainable Development Goals (Studi Kasus di Desa Kelet Kec. Keling Kab. Jepara)"** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Aji Ali Saputra
NIM : 1706016016
Semester : XI
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Sleman/16 Maret 1999
CP/e-mail : 089664483897/ajialisaputra7@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Ali Anwar/Khuriyatun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Geneng RT 14/03 Batealit Jepara

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 2 : Daftar Narasumber

1. Abdul Aziz (Petinggi Desa Kelet) Wawancara pada 28 November 2022
2. Ibu Krisnawati (PKK Desa Kelet) Wawancara pada 5 Desember 2022
3. Ibu Ita (PKK Desa Kelet) Wawancara pada 28 November 2022
4. Ibu Sulastri (PKK Desa Kelet) Wawancara pada 5 Desember 2022
5. Bapak Muhtadi (FKD Desa Kelet) Wawancara pada 5 Desember 2022
6. Bapak Joko (BPD Desa Kelet) Wawancara pada 28 November 2022
7. Mas Miqdad (Pemuda Kelet) Wawancara pada 10 Desember 2022
8. Mas Zidni (Bank Sampah Kelet) Wawancara pada 10 Desember 2022

Lampiran 2 : Foto Wawancara Narasumber



Foto bersama Bapak Abdul Aziz petinggi desa kelet



Foto bersama Ibu Ita PKK Kelet



Foto bersama Bapak Muhtadi FKD



Foto bersama Bapak Joko BPD



Foto bersama Ibu Krisnawati PKK



Foto bersama mas Miqdad (Pemuda) & mas Zidni (Bank Sampah)



Foto bersama Ibu Sulastri PKK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Aji Ali Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 16 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Ds. Geneng rt 14 rw 03 Batealit Jepara
Nomor Hp/WA : 089664483897
Email : ajialisaputra7@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK Annur III Sleman	2005
2.	SD Nanggulan Sleman	2006
3.	SD N 03 Pecangaan Wetan	2011
4.	SMP N 1 Pecangaan	2014
5.	MA Walisongo Pecangaan	2017
6.	UIN Walisongo Semarang	Sekarang

Pengalaman Organisasi :

No.	Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	Pramuka	Sekretaris	2015-2016
2.	Pramuka	Pembina	2022

3.	Osis MA Walisongo	Pendidikan	2015-2016
4.	IPNU Komisariat MA Walisongo	Minat & Bakat	2015-2016
5.	IPNU Ranting Geneng	Kaderisasi	2021-2023
6.	IPNU Anak Cabang Batealit	Jaringan Sekolah Pesantren	2021-2023
7.	PMII FISIP	Ketua	2019-2020
8.	PMII UIN Walisongo	Koordinator LAKW	2020-2021
9.	PMII Kota Semarang	Hubungan & Komunikasi Pemerintah & Kebijakan Publik	2022-2023
10.	HMJ Ilmu Politik	Pendidikan	2017-2018
11.	HMJ Ilmu Politik	Wakil Ketua	2018-2019
12.	KMJS UIN Walisongo	Kaderisasi	2018-2020
13.	KMJS Pusat	Advokasi & Jaringan	2020-2021

Semarang, 14 Desember 2022

Penulis



Aji Ali Saputra